



**PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON**

2025

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIREBON**

Jl. Sunan Drajat No. 15 – Sumber
Telepon 0231-8330580
Kode Pos 45611

Email : diskominfo@cirebonkab.go.id, Website : <http://diskominfo.cirebonkab.go.id>

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Sumber, Februari 2026

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIREBON**



BAMBANG SUDARYANTO, SH., MH.

Pembina Tk. I

NIP. 19781024 200604 1 015

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Pohon Kinerja, Cascading, Crosscuting dan Struktur Organisasi.....	1
1.2 Tugas dan Fungsi dan Peta Jabatan	4
1.3 Isu-isu Strategis.....	5
1.4 Dukungan SDM, Saran Prasarana dan Anggaran.....	5
1.5 Tindak Lajut atas Laporan Evaluasi SAKIP tahun 2024.....	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	11
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja.....	11
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	14
2.3 Struktur Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025.....	21
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	23
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	28
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	28
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	29
3.2.1 Sasaran Strategis ke-1.....	29
3.2.2 Sasaran Strategis ke-2.....	36
3.2.3 Sasaran Strategis ke-3.....	43
3.2.4 Sasaran Strategis ke-4.....	49
3.2.5 Sasaran Strategis ke-5.....	54
3.3 Realisasi Anggaran.....	58
3.4 Inovasi.....	60
3.5 Penghargaan/Lintas Sektor.....	61
BAB IV PENUTUP	62
4.1 Kesimpulan	62
4.2 Langkah Perbaikan.....	63

LAMPIRAN	65
Lampiran 1. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	66
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.....	67
Lampiran 3. Catatan Hasil Reviu atas LKjIP Tahun 2024	68
Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKjIP Tahun 2023.....	69
Lampiran 5. IKU 1 - Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025	70
Lampiran 6. IKU 2 - Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.....	71
Lampiran 7. IKU 3 - Hasil Pengolahan dan Analisis Data Statistik Sektoral Tahun 2025.....	72
Lampiran 8. IKU 4 - Hasil Penilaian Mandiri Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Tahun 2025.....	73
Lampiran 9. IKU 5 - Hasil Penilaian LKIP Tahun 2025.....	74
Lampiran 10. Formulasi Tingkat Efisiensi	74
Lampiran 11. Capaian Kinerja Diskominfo Kabupaten Cirebon Tahun 2025	76
Lampiran 12. Surat Pernyataan Telai Direviu.....	78
Lampiran 13. Laporan Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2025	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis kelamin dan Kompetensi.....	5
Tabel 1.2	Perbandingan Pegawai ASN dan Non ASN Tahun 2025.....	6
Tabel 1.3	Data Aset Dinas Komunikaasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2025.....	6
Tabel 2.1	Kinerja Diskominfo Tahun 2025.....	13
Tabel 2.2	Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Diskominfo.....	15
Tabel 2.3	Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025.....	21
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025.....	23
Tabel 2.5	Target Belanja Diskominfo Tahun 2025.....	24
Tabel 2.6	Alokasi Anggaran per Sasaran.....	24
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	28
Tabel 3.2	Realisasi dan Capaian Kinerja Utama Tahun 2025.....	28
Tabel 3.3	Formulasi Perhitungan Sasaran 1.....	30
Tabel 3.4	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran 1	30
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Tahun Sebelumnya	31
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2025-2029.....	31
Tabel 3.7	Tingkat Efisiensi Sasaran 1	32
Tabel 3.8	Program dan Kegiatan yang Menunjang Sasaran 1.....	33
Tabel 3.9	Rentang Nilai Predikat.....	36
Tabel 3.10	Formulasi Perhitungan Sasaran 2.....	36
Tabel 3.11	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 2	36
Tabel 3.12	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Tahun Sebelumnya	37
Tabel 3.13	Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2025-2029.....	37

Tabel 3.14	Perbandingan Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik di wilayah Metropolitan Rebana di Tahun 2025	38
Tabel 3.15	Tingkat Efisiensi Sasaran 2.....	40
Tabel 3.16	Program dan Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis 2.....	41
Tabel 3.17	Formulasi Perhitungan Sasaran 3.....	43
Tabel 3.18	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 3.....	43
Tabel 3.19	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Tahun Sebelumnya.....	45
Tabel 3.20	Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2025-2029.....	45
Tabel 3.21	Tingkat Efisiensi Sasaran 3.....	47
Tabel 3.22	Program dan Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis 3.....	47
Tabel 3.23	Formulasi Pengukuran Sasaran 4	49
Tabel 3.24	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran 4.....	49
Tabel 3.23	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Tahun Sebelumnya	51
Tabel 3.24	Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2019-2025.....	51
Tabel 3.27	Tingkat Efisiensi Sasaran 4.....	52
Tabel 3.28	Program dan Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis 4.....	53
Tabel 3.29	Formulasi Perhitungan Sasaran 5.....	54
Tabel 3.30	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran 5.....	54
Tabel 3.31	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Tahun Sebelumnya	55
Tabel 3.32	Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2019-2025	55
Tabel 3.32	Tingkat Efisiensi Sasaran 5.....	56
Tabel 3.34	Program dan Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis 5.....	57
Tabel 3.35	Pendapatan dan Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2025	59
Tabel 3.36	Capaian Anggaran per Sasaran	59

DAFTAR GAMBAR

		Hal.
Gambar 1.1	Pohon Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	2
Gambar 1.2	Cascading Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	2
Gambar 1.3	Crosscutting Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	3
Gambar 1.4	Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Diskominfo Kabupaten Cirebon.....	3
Gambar 1.5	Struktur Organisasi Diskominfo Kabupaten Cirebon.....	4
Gambar 2.1	Aplikasi E-SAKIP.....	25
Gambar 2.2	Aplikasi e-kinerja BKN.....	25
Gambar 2.3	Aplikasi Simonek.....	26
Gambar 2.4.	Aplikasi E-Perencanaan.....	26
Gambar 2.5.	Aplikasi SIPD.....	27

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 – 2025. Visi tersebut yakni ***“Terwujudnya Kabupaten Cirebon Bersih, Inovatif, Maju, Agamis dan Aman”***, dengan misi yang diampu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon yaitu misi ke-4 ***“Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.”*** Maka Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon ***“Meningkatkan Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Akuntabilitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan”*** Tujuan tersebut menggunakan sasaran yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
- 2) Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik;
- 3) Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- 4) Terwujudnya penyelenggaraan persandian;
- 5) Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan uraian pada batang tubuh Laporan LKJIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2025, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon telah menetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.
- 2) Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon tahun 2025 berdasarkan capaian kinerja dengan kategori Sangat Tinggi ditunjukkan pada 5 (lima) indikator yaitu Indeks Domain Tata Kelola SPBE (119,04%), Indeks Keterbukaan Informasi Publik dengan capaian kinerja 120%, Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral dengan capaian kinerja 113%, Indeks Keamanan Informasi dengan capaian kinerja 100%, dan Nilai LKIP dengan capaian 106,99%.
- 3) Anggaran belanja Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2025 Rp. **17.363.686.848,00** dengan realisasi Rp. **16.561.507.008,00** atau sebesar **95,38%**.

Evaluasi atas sasaran strategis, pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon ke depan, sebagai berikut:

- 1) Melakukan perbaikan perencanaan dengan membuat pemetaan dalam rangka penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan dalam upaya menyelaraskan target sasaran yang telah ditetapkan dengan regulasi yang ada.
- 2) Melakukan kerjasama dengan penyelenggara pelatihan yaitu BKPSDM dan lembaga pelatihan swasta, khususnya untuk pelatihan teknis teknologi informasi, statistik, persandian, perencanaan dan kepegawaian.
- 3) Aspek perencanaan strategis SPBE, aspek teknologi informasi dan komunikasi dan aspek penyelenggara SPBE harus direviu, dievaluasi dan diperbaiki secara berkala dan terus menerus. Melalui proses reviu dan evaluasi serta perbaikan secara terus menerus, diharapkan untuk tahun berikutnya dapat mencapai nilai indeks Domain Tata Kelola SPBE sesuai dengan target yang ditentukan.
- 4) Aspek perencanaan strategis SPBE dapat ditingkatkan dengan melibatkan Diskominfo dalam rencana anggaran SPBE, melibatkan semua perangkat daerah dalam penyusunan dokumen inovasi proses bisnis SPBE dan menyusun dokumen terkait proses pembangunan aplikasi SPBE.
- 5) Aspek teknologi informasi dan komunikasi dapat ditingkatkan dengan mengintegrasikan atas layanan pusat data dengan layanan pusat data nasional atau pusat data daerah lainnya, dan mengintegrasikan jaringan intra dengan jaringan intra instansi pusat/pemerintah daerah lainnya.
- 6) Aspek penyelenggara SPBE dapat ditingkatkan dengan melakukan reviu fungsi Tim Koordinasi SPBE yang telah ada dengan program kerja yang terencana yang ada pada Peta rencana SPBE.
- 7) Penyelesaian strategi media, mengidentifikasi tren kelemahan dan potensi perbaikan dalam penggunaan setiap jenis media, peningkatan konten, pemanfaatan teknologi, optimasi platform online, peningkatan kemitraan media dan melibatkan partisipasi masyarakat agar keterbukaan informasi publik dapat meningkat.
- 8) Mendorong peningkatan single data dan big data centre yang terintegrasi, sehingga akan mempercepat dalam analisis terhadap berita dan opini, audit serta pengukuran indeks kepuasan, indeks pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang nantinya dikompilasi dalam sebuah direktori data internal agar bisa dipergunakan sebagai bahan sosialisasi namun tetap meningkatkan koordinasi validitas data dengan instansi atau perangkat daerah terkait.
- 9) Melakukan kerjasama dengan stakeholder dalam membangun dan mengembangkan tata kelola data statistik sektoral
- 10) Mengarahkan para SDM di perangkat daerah untuk mengikuti program pelatihan Pemograman melalui Digitalent Kominfo.

BAB I PENDAHULUAN

BAB I berisi :

- 1.1 *Pohon Kinerja, Cascading Kinerja, Crosscutting Kinerja dan Struktur Organisasi*
- 1.2 *Fungsi dan Tugas dan Peta Jabatan*
- 1.3 *Isu-Isu Strategis*
- 1.4 *Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran*
- 1.5 *Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2024 ex post Tahun 2023*

1. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor: 000.8.6.3/4/SETDA tanggal 13 Januari 2026 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Tahun 2025.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuahke pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 diharapkan dapat:

- 1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah danseharusnya dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 2. Mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dandapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- 3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk meningkatkan kinerjanya.
- 4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Pohon Kinerja, Cascading Kinerja, Crsscuting Kinerja dan Struktur Organisasi

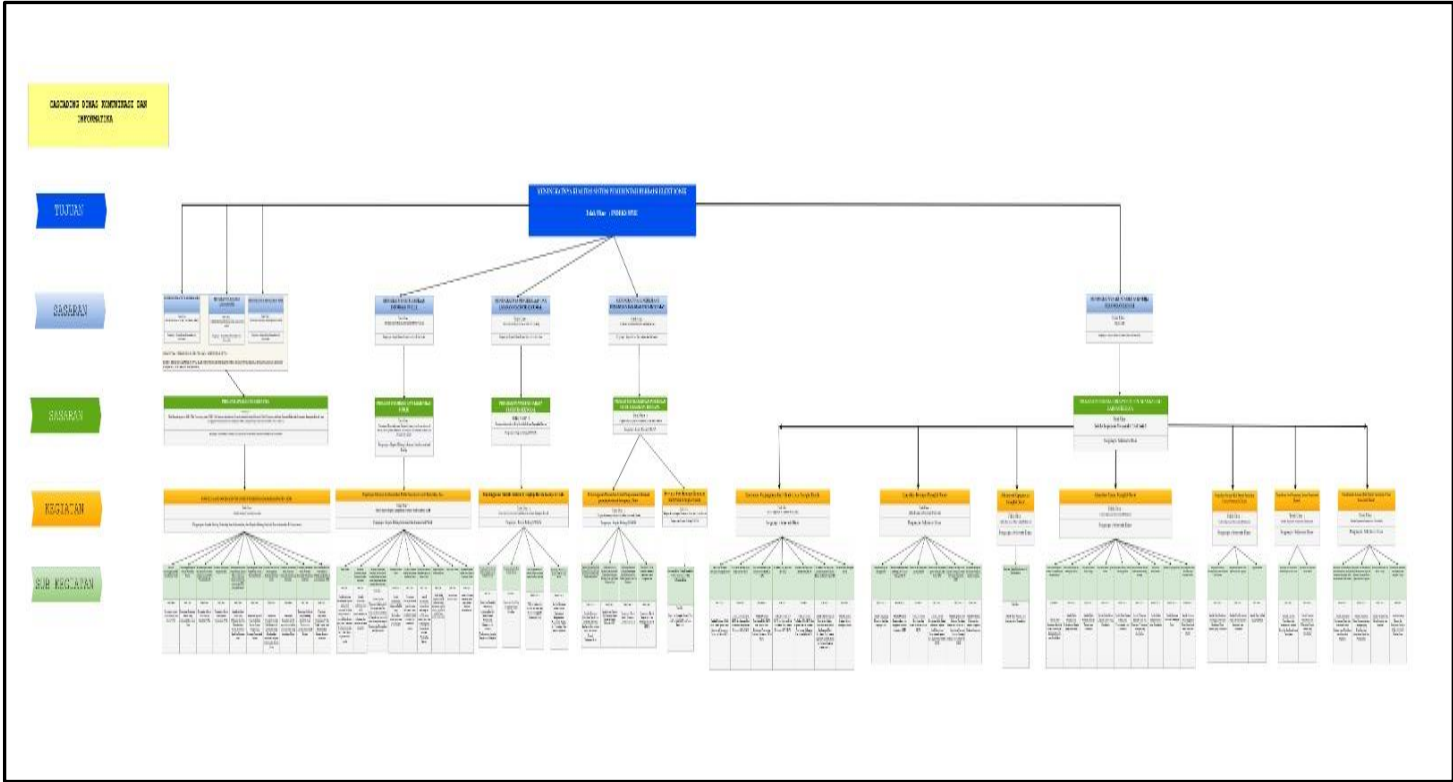
1.1.1 Pohon Kinerja, Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, setiap Perangkat Daerah dibentuk untuk memberika nkontribusi pada pencapaianvisi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentangPerubahan Rencana



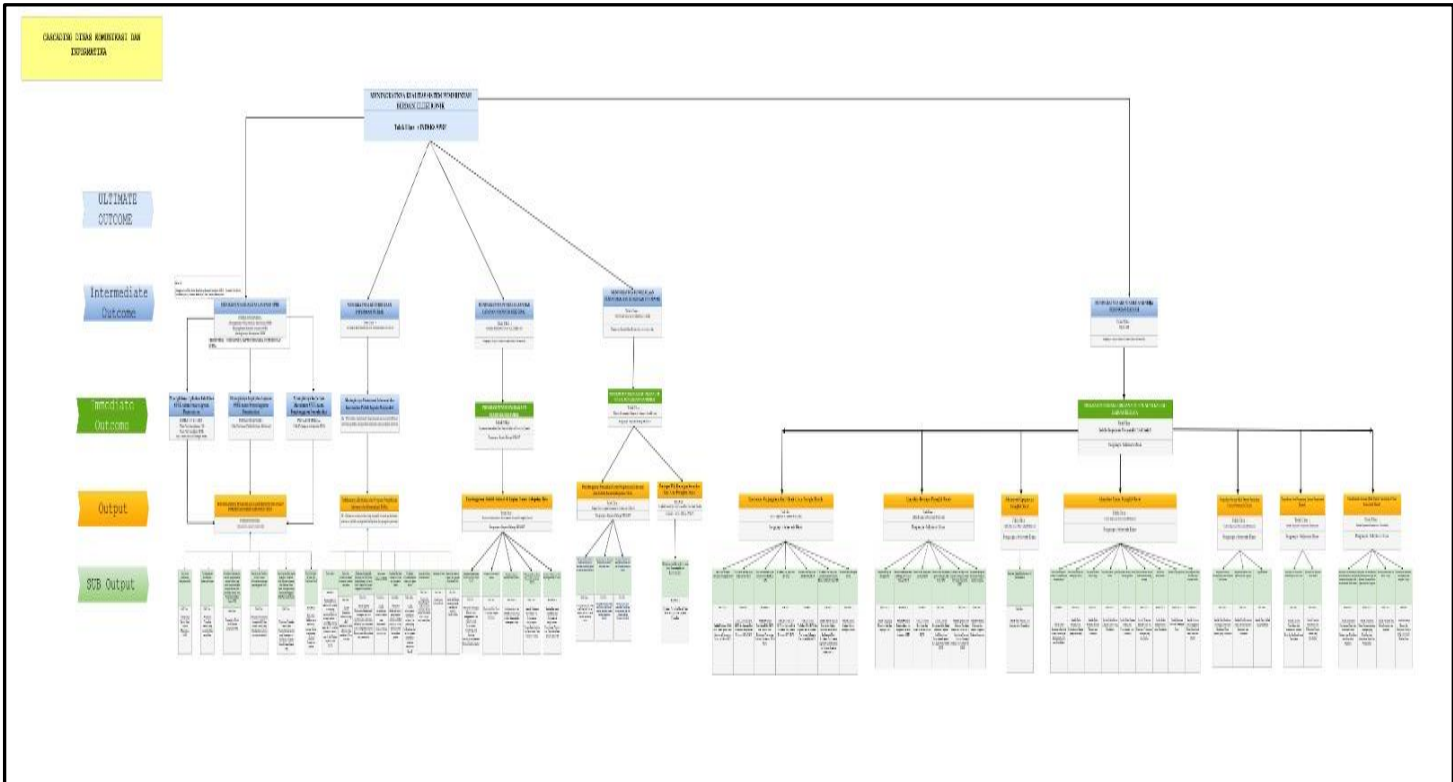
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut.

Gambar 1.1 Pohon Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon



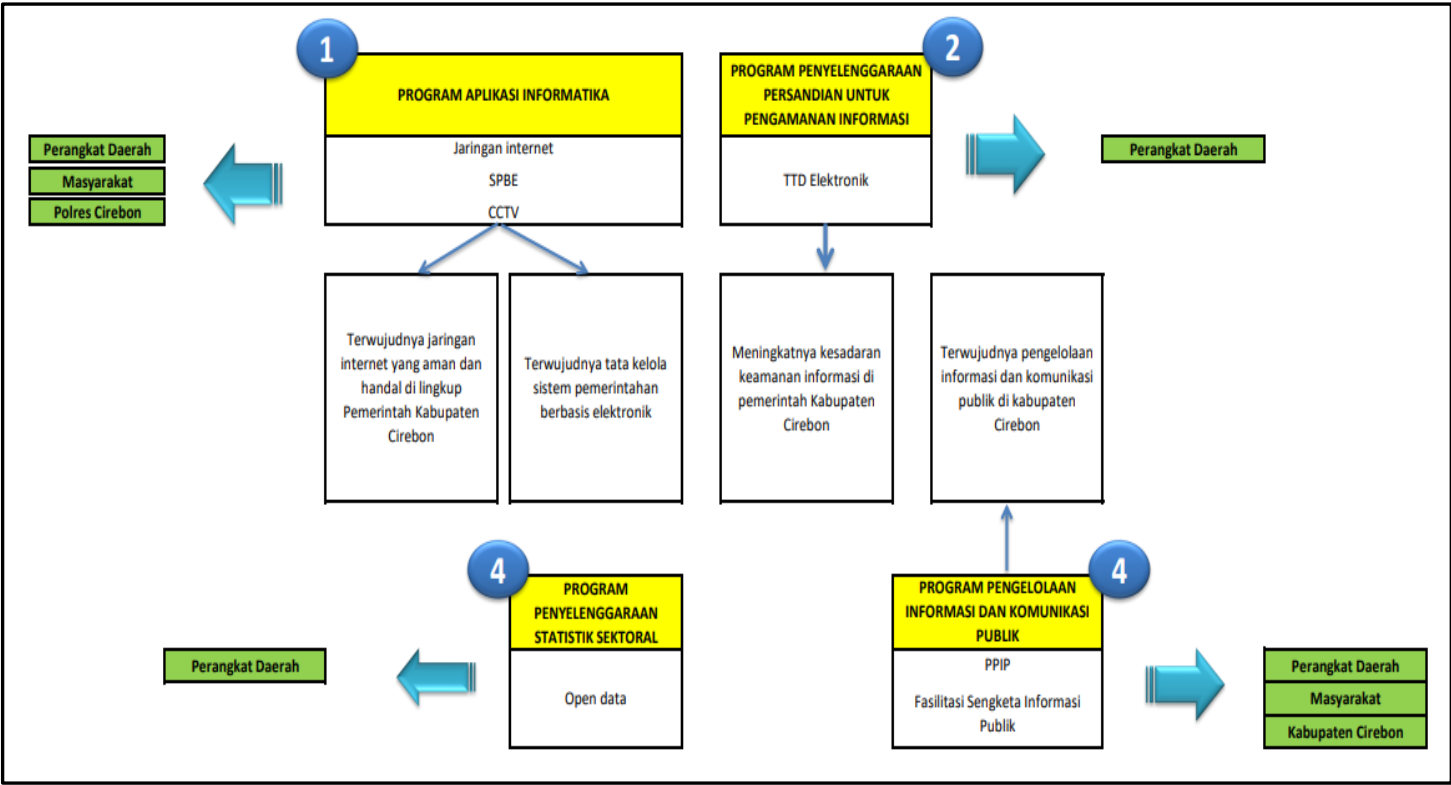
Sumber :Dokumen Pohon Kinerja Diskominfo Tahun 2025

Gambar 1.2 Cascading Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon



Sumber :Dokumen Cascading Diskominfo Tahun 2025

Gambar 1.3 Crosscutting Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

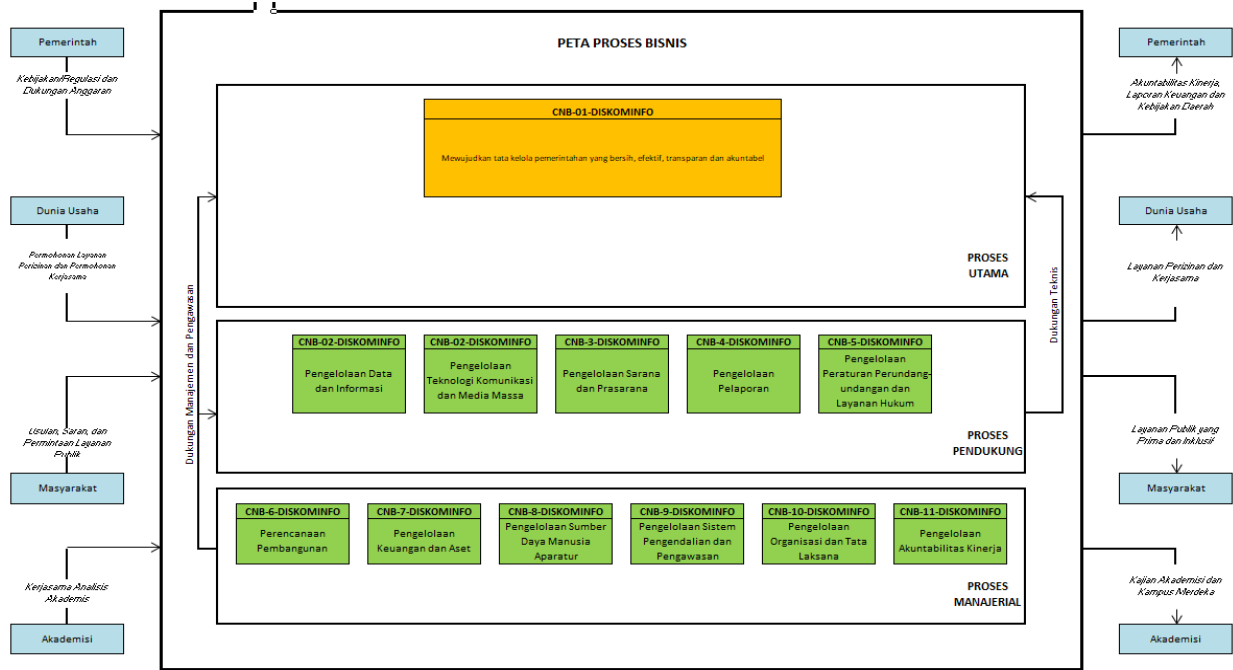


Sumber :Dokumen Crosscutting Diskominfo Tahun 2025

1.1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandate kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar 1.4 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Diskominfo Kabupaten Cirebon

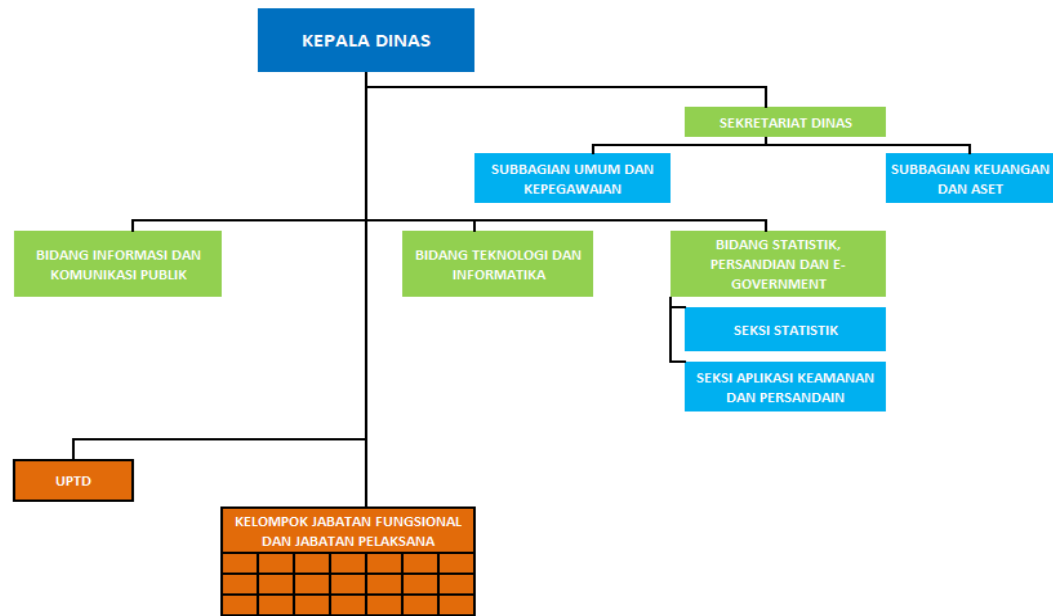


Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tata kerja yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon memiliki struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 143 Tahun 2023 sebagai berikut :

Struktur Organisasi

- 1. Kepala
- 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset
- 3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
- 4. Bidang Teknologi dan Informatika
- 5. Bidang Statistik, Persandian dan E-Government, terdiri dari:
 - a. Seksi Statistik
 - b. Seksi Aplikasi Keamanan dan Persandian
- 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah
 - Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Gambar 1.5 Struktur Organisasi Diskominfo Kabupaten Cirebon



1.2 Tugas dan Fungsi dan Peta Jabatan

Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon. Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut maka diterbitkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 143 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tugas Pokok

“Melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan Daerah.”

Fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- b. pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- c. pengelolaan aplikasi informatika;
- d. pengelolaan statistik sektoral;
- e. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
- f. Pelaksanaan dan pelaporan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian;
- g. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana instansi tersebut mampu menemukan mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

- 1. Belum optimalnya fasilitas teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik.
- 2. Masih rendahnya diseminasi informasi mengenai kebijakan dan hasil Pembangunan daerah dalam mendukung keterbukaan informasi publik.
- 3. Mewujudkan Satu Data Kabupaten Cirebon untuk mengintegrasikan dan mengelola data dari berbagai sumber menjadi satu sistem yang terintegrasi, akurat, dan terkini.
- 4. Kurangnya pemahaman serta kesadaran keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah

1.4 Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran

Dinas Komunikasi dan Informatika didukung oleh 55 orang Pegawai Negeri Sipil dan PPPK, yang memiliki keterampilan memadai yang merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) sebagai pendukung organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang cukup strategis dalam urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Pegawai yang Ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Laki	Peremp.
			S2	S1	D3	SLTA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi							
	Kepala Dinas	1	1				1	
B.	Jabatan Administrasi							
	1. Administrator	4	1	3			2	2
	2. Pengawas	4	2	2			4	
	3. Pelaksana	7		2	3	2	4	3
C.	Jabatan Fungsional	18		16	2		13	5
D.	PPPK Penuh Waktu	14		9		5	11	3
E.	PPPK Paruh Waktu	7		3		4	7	
	Jumlah	55	4	35	5	11	42	13

Sumber : Data Kepegawaian Diskominfo Kabupaten Cirebon, Desember 2025

Berdasarkan data pada tabel 1.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 4 orang (7,27%), disusul jenjang pendidikan S1 sebanyak 35 orang (63,63%), D3 5 orang (9,09%), SLTA 11 orang (20%). Komposisi pegawai laki-laki lebih banyak dibanding pegawai

perempuan; untuk jabatan struktural hamper sama banyak antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Jumlah ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sebanyak 55 pegawai. Yang terbagi PNS dan PPPK di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon berdasarkan data terakhir Bulan Desember 2025 diinformasikan pada tabel berikut sebagai berikut :

Tabel 1.2 Perbandingan Pegawai ASN PNS dan PPPK Tahun 2025

No	Jenis Pegawai	Jumlah	Persentase (%)
1.	PNS	26	47,27
2.	PPPK Penuh Waktu	22	40,00
3.	PPPK Paruh Waktu	7	17,73
Jumlah Total		55	100

Sumber : Data KepegawaianDiskominfoKabupaten Cirebon, Desember2025

Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada saat ini digunakan seoptimal mungkin untuk menunjang pelaksanaan operasional kegiatan. Adapun keadaan sarana dan prasarana perlengkapan kantor yang ada saat ini berupa kantor ada 4 unit:

- a. Gedung Utama di Jalan Sunan Drajat No. 15 Sumber yang ditempati Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, dan Bidang Statistik, Persandian dan E-Government, Desk Informasi Publik, aula Diskominfo, Mushola
- b. Gedung Data Center di jalan Sunan Drajat No. 15 Sumber yang terdiri dari 2 lantai yaitu lantai 1 yang ditempati Bidang teknologi Informatika, Ruang Rapat sedangkan lantai 2 merupakan ruang server dan Ruang Learning Center
- c. Gedung Komisi Informasi Kabupaten Cirebon di Jalan Sunan Drajat No. 15 Sumber. Command Center Kabupaten Cirebon di Jl. Sunan Kalijaga No.7 Sumber yang berada di Kantor Bupati Cirebon.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon memiliki sarana penunjang berupa kendaraan dinas/operasional sejumlah:

- a. Kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 1 unit

Sedangkan aset lain berupa sarana parasarana penunjang kegiatan kantor, yang ada di sekretariat dan bidang-bidang rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Data Aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2025

Kode Barang	Nama Bidang Barang	BMD	Keterangan
GOLONGAN TANAH			
1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I.	1	
1.3.1.01.01.01.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah.	2	
GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN			
1.3.2.01.03.04.001	Transportable Generating Set.	2	
1.3.2.01.03.04.002	Portable Generating Set.	1	
1.3.2.01.03.04.003	Stationary Generating Set.	1	
1.3.2.03.02.07.003	Bor.	1	
1.3.2.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal.	27	
1.3.2.05.01.04.002	Lemari Kayu.	6	

1.3.2.05.01.04.003	Rak Besi.	16	
1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu.	1	
1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi.	8	
1.3.2.05.01.04.007	Brandkas.	1	
1.3.2.05.01.04.026	Lemari Sorok.	3	
1.3.2.05.01.04.027	Lemari Kaca.	2	
1.3.2.05.01.05.002	CCTV - Camera Control Television System.	51	
1.3.2.05.01.05.008	Copy Board/Elektrik White Board.	1	
1.3.2.05.01.05.010	Alat Penghancur Kertas.	1	
1.3.2.05.01.05.027	Alat Pengaman / Sinyal.	7	
1.3.2.05.01.05.043	LCD Projector/Infocus.	2	
1.3.2.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu.	4	
1.3.2.05.02.01.005	Sice.	1	
1.3.2.05.02.01.008	Meja Rapat.	27	
1.3.2.05.02.01.014	Meja Resepsionis.	3	
1.3.2.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro.	34	
1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat.	142	
1.3.2.05.02.01.031	Kursi Tamu.	5	
1.3.2.05.02.01.032	Kursi Putar.	44	
1.3.2.05.02.01.039	Meja Komputer.	26	
1.3.2.05.02.01.048	Sofa.	5	
1.3.2.05.02.03.003	Mesin Pemotong Rumput.	1	
1.3.2.05.02.04.001	Lemari Es.	1	
1.3.2.05.02.04.004	AC Split.	42	
1.3.2.05.02.04.007	Exhaust Fan.	14	
1.3.2.05.02.05.002	Kompas Gas (Alat Dapur).	1	
1.3.2.05.02.05.009	Tabung Gas.	2	
1.3.2.05.02.06.001	Radio.	1	
1.3.2.05.02.06.002	Televisi.	28	
1.3.2.05.02.06.007	Loudspeaker.	3	
1.3.2.05.02.06.008	Sound System.	7	
1.3.2.05.02.06.012	Wireless.	6	
1.3.2.05.02.06.014	Microphone.	9	
1.3.2.05.02.06.018	Unit Power Supply.	7	
1.3.2.05.02.06.021	Camera Video.	1	
1.3.2.05.02.06.022	Camera film.	1	
1.3.2.05.02.06.036	Tangga Aluminium.	3	
1.3.2.05.02.06.039	Mimbar/Podium.	1	
1.3.2.05.02.06.048	Handy Cam.	1	
1.3.2.05.02.06.058	Vertikal Blind.	20	
1.3.2.05.02.07.001	Alat Pemadam/Portable.	19	
1.3.2.05.03.01.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III.	4	
1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV.	1	
1.3.2.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural.	10	
1.3.2.05.03.03.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II.	1	
1.3.2.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III.	12	
1.3.2.05.03.03.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural.	1	
1.3.2.05.03.07.004	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II.	2	
1.3.2.06.01.01.002	Audio Mixing Portable.	2	
1.3.2.06.01.01.025	Audio Visual.	1	
1.3.2.06.01.01.036	Microphone/Wireless MIC.	40	
1.3.2.06.01.01.056	Blank Panel.	10	
1.3.2.06.01.01.090	Digital LED Running Text.	1	
1.3.2.06.01.02.012	Video Monitor.	1	
1.3.2.06.01.02.015	Video Mixer.	1	
1.3.2.06.01.02.045	Tripod Camera.	3	
1.3.2.06.01.02.060	Camera Film.	2	
1.3.2.06.01.02.061	Lensa Kamera.	4	

1.3.2.06.01.02.105	Layar Film/Projector.	3	
1.3.2.06.01.02.126	Camera Digital.	10	
1.3.2.06.01.02.163	Camera Conference.	1	
1.3.2.06.01.05.038	GPS Receiver.	3	
1.3.2.06.01.05.047	Kamera Udara.	1	
1.3.2.06.02.01.003	Pesawat Telephone.	1	
1.3.2.06.02.01.010	Facsimile.	1	
1.3.2.06.02.06.002	Wireless Amplifier.	2	
1.3.2.06.02.08.043	Alat Jamming Frekuensi.	3	
1.3.2.06.03.20.001	Self Supporting Tower.	6	
1.3.2.10.01.02.001	PC Unit.	67	
1.3.2.10.01.02.002	Lap Top.	19	
1.3.2.10.01.02.003	Note Book.	4	
1.3.2.10.01.02.009	Tablet PC.	1	
1.3.2.10.02.01.012	Hard Disk.	1	
1.3.2.10.02.02.001	Card Reader (Peralatan Mini Komputer).	31	
1.3.2.10.02.03.002	Monitor.	2	
1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer).	26	
1.3.2.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer).	12	
1.3.2.10.02.03.017	External/ Portable Hardisk.	6	
1.3.2.10.02.04.001	Server.	33	
1.3.2.10.02.04.002	Router.	13	
1.3.2.10.02.04.003	Hub.	4	
1.3.2.10.02.04.014	Rak Server.	7	
1.3.2.10.02.04.015	Firewall.	1	
1.3.2.10.02.04.020	CAT 6 Cable.	6	
1.3.2.10.02.04.021	Kabel UTP.	1	
1.3.2.10.02.04.023	Wireless Access Point.	4	
	GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN		
1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen.	5	
1.3.3.01.01.13.001	Gedung Pos Jaga Permanen.	1	
1.3.3.01.01.33.002	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen.	1	
1.3.3.01.01.36.001	Taman Permanen.	1	
1.3.3.03.01.03.002	Bangunan Menara Radio.	2	
1.3.3.03.01.03.005	Bangunan Menara Antena Microwave/Parabolic.	16	
1.3.3.04.01.04.001	Pagar Permanen.	1	
	GOLONGAN JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI		
1.3.4.03.07.01.004	Instalasi Komunikasi Elektronik (KOMLEK).	44	
1.3.4.04.02.01.002	Jaringan Transmisi Tegangan 100 S/D 300 KVA.	2	
1.3.4.04.03.01.001	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Kecil.	1	
	GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA		
1.3.5.01.01.01.003	Ilmu Pengetahuan Umum.	10	
1.3.5.01.02.01.002	Video.	2	
	GOLONGAN ASET LAINNYA		
1.5.3.01.01.05.001	Software.	27	
1.5.3.01.01.06.001	Kajian.	9	

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Aset Diskominfo, Desember 2025

Anggaran

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2025 berasal dari APBD Kabupaten Cirebon. Pada anggaran murni Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.16.084.475.448,00 dengan rincian belanja operasi sebesar Rp.15.422.176.548,00 yang di dalamnya meliputi belanja pegawai sebesar Rp. 4.738.940.208,00 dan belanja barang dan jasa Rp.10.683.236.340,00 dan juga terdapat anggaran untuk belanja modal sebesar Rp.662.298.900,00.

Pada perubahan anggaran Tahun 2025 anggaran belanja Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi Rp.17.363.686.848,00 dengan rincian belanja operasi sebesar Rp.16.577.693.948,00 yang didalamnya meliputi belanja pegawai sebesar Rp. 5.361.813.208,00 dan belanja barang dan jasa Rp.11.215.880.740,00 dan juga terdapat anggaran untuk belanja modal sebesar Rp.785.992.900,00 yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung, yang didukung oleh 5 (lima) program, 10 (Sebelas) kegiatan, dan 34 (tiga puluh tiga) sub kegiatan

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM RUBAHAN (Rp.)	ANGGARAN SETELAH RUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)
5.	BELANJA	16.084.475.448	17.363.686.848	1.279.211.400
5.1.	BELANJA OPERASI	15.422.176.548	16.577.693.948	1.155.517.400
5.1.01.	BELANJA PEGAWAI	4.738.940.208	5.361.813.208	622.873.000
5.1.02.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.683.236.340	11.215.880.740	532.644.400
5.2.	BELANJA MODAL	662.298.900	785.992.900	123.694.000
5.2.02.	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	662.298.900	785.992.900	123.694.000

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Tahun 2025 berdasarkan Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor: 000.8.6.3/4/SETDA tanggal 13 Januari 2026 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I . PENDAHULUAN

Bab ini akan menjabarkan tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Potensi yang menjadi ruanglingkup Perangkat Daerah dan Sistematika penulisan LKjIP .

BAB II . PERENCANAAN KINERJA

Bab ini disajikan tentang gambaran singkat mengenai perencanaan strategis, perjanjian kinerja, dan rencana anggaran. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih Perangkat Daerah pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Pada bagian disajikan pula perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/sejenis.

BAB IV. PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan,permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Perangkat Daerah yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

NO	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
A.	PERENCANAAN KINERJA	
1.	Dalam pedoman penyusunan teknis perencanaan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika namun belum tersedianya SOP Penyusunan Rencana Aksi	SUDAH DITINDAK LANJUTI
B.	PENGUKURAN KINERJA	
2.	Setiap Level organisasi melakukan pemantuan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang namun belum tersedianya dokumen laporan tim kerja	SUDAH DITINDAK LANJUTI
NO	URAIAN HASIL EVALUASI	
C.	PELAPORAN KINERJA	
3.	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organissasi namun belum didukung dengan Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	SUDAH DITINDAK LANJUTI
D.	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai namun belum tersedianya Bukti Dukung keterlibatan Tim SPI dalam evaluasi kinerja internal	SUDAH DITINDAK LANJUTI

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB II berisi :

- 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
- 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan
- 2.3 Struktur Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025
- 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja Tahun 2025

Memasuki Tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029. Renstra Komunikasi dan Informatika merupakan manifestasi komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2025-2029). RPJMD Pemerintah Kabupaten Cirebon merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

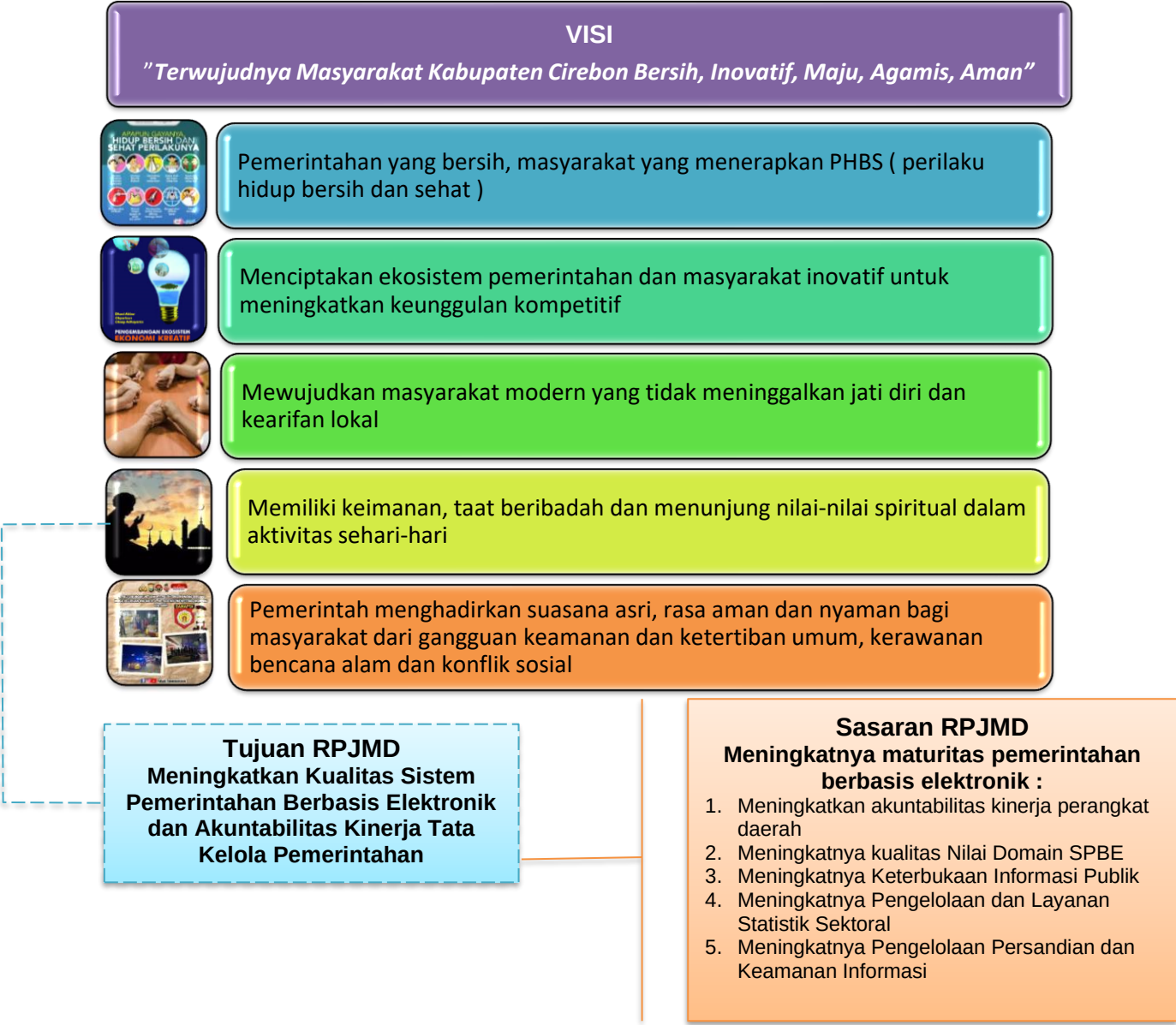
Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis, dan berkesinambungan.

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon yang ada pada dokumen Renstra 2025-2029 mengacu pada Visi dan Misi Bupati Cirebon Tahun 2025-2029, yaitu :

Gambar 2.1 Cascading Kinerja Bupati yang diampu Diskominfo Kabupaten Cirebon



Sumber : RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029

Salah satu tujuan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mencapai Visi Bupati Cirebon dan Misi kesatu yaitu **"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel dan profesional"** dengan sasaran :

- 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
- 2. Meningkatnya Kualitas Nilai Domain SPBE
- 3. Meningkatnya keterbukaan informasi publik
- 4. Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral
- 5. Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi

sehingga pemerintahan Kabupaten Cirebon yang diharapkan kedepan adalah pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan berbasis teknologi informasi dengan mengedepankan layanan yang terintegrasi.

Untuk menjalankan tujuan dan sasaran RPJMD dimaksud, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon menyusun tujuan dan sasaran sesuai dengan implementasi misi kesatu yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel dan profesional.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan :

Adapun tujuan jangka menengah yang akan dicapai Diskominfo Kabupaten Cirebon dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah selama Tahun 2025-2029 yaitu:

“Meningkatkan Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Akuntabilitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan”

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kinerja Diskominfo Kabupaten CirebonTahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKIP	Nilai	75,75	75,80	75,85	75,90	75,95	76,00
2.	Meningkatnya Kualitas Nilai Domain SPBE	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Poin	3,15	3,20	3,25	3,30	3,35	3,40
3.	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Poin	75,00	80,00	82,00	84,00	86,00	90,00
4.	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,92	2,95	3,00	3,10	3,20	3,30
5.	Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI) V.5	Poin	550	600	625	650	675	700

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Serta Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.

Tabel 2.2 Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Diskominfo Kabupaten Cirebon

Visi	:	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon Bersih, Inovatif, Maju, Agamis, Aman					
Misi I	:	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel dan profesional					
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Meninngkatkan Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Akuntabilitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pelayanan perencanaan dan pelaporan Dinas	Peningkatan kesesuaian laporan kinerja dan laporan keuangan Dinas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	* Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Peningkatan ketersediaan data dan informasi Dinas			* Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Peningkatan kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas			* Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
			Peningkatan kualitas pelayanan administrasi keuangan Dinas	Peningkatan akurasi dan kecepatan dalam pengelolaan keuangan Dinas			* Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
			Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja yang sesuai standar	Pemeliharaan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung kinerja pegawai			* Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
				Pengadaan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung kinerja pegawai			* Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD * Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	* Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN * Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD * Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Visi	:	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon Bersih, Inovatif, Maju, Agamis, Aman					
Misi I	:	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel dan profesional					
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
							* Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD * Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD * Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	* Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	* Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor * Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor * Penyediaan Peralatan Rumah Tangga * Penyediaan Bahan Logistik Kantor * Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan * Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan * Penyediaan Bahan/Material * Fasilitas Kunjungan Tamu * Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	* Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Visi	:	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon Bersih, Inovatif, Maju, Agamis, Aman					
Misi I	:	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel dan profesional					
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
							* Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan * Pengadaan Mebel
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	* Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik * Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	* Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan * Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan * Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya * Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Meningkatkan Kualitas Nilai Domain SPBE	Peningkatan Kualitas Tata kelola SPBE	Meningkatnya kualitas Layanan publik dan Pemerintahan berbasis TIK	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	* Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE
			Peningkatanya Kulaitas Layanan SPBE	Meningkatnya Tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik			* Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
			Peningkatan Kualitas Manajemen SPBE	Meningkatnya Kualitas Manajemen Sistem pemerintahan Berbasis elektronik			* Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE

Visi	:	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon Bersih, Inovatif, Maju, Agamis, Aman					
Misi I	:	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel dan profesional					
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
							Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah * Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE * Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
		Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Peningkatan kualitas tata kelola informasi dan komunikasi publik Peningkatan kualitas pelayanan informasi dan komunikasi publik melalui berbagai media komunikasi	Penyusunan regulasi tata kelola pengelolaan informasi dan komunikasi publik Peningkatan kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik Penyediaan dukungan terhadap kelembagaan Komisi Informasi Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Peningkatan pemantauan Opini dan Aspirasi Publik	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	* Relasi Media * Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat * Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik * Pelayanan Informasi Publik * Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Visi	:	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon Bersih, Inovatif, Maju, Agamis, Aman					
Misi I	:	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel dan profesional					
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral	Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik sektoral yang tervalidasi dan terverifikasi	Meningkatkan kepercayaan pengguna data sektoral terhadap kualitas data yang disajikan	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	* Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik * Pengelolaan Media Komunikasi Publik * Penyusunan Konten * Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik * Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional * Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral * Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar * Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral
		Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan keamanan informasi dan persandian	Optimasi penerapan, pemantauan, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan SNI ISO/IEC 27001	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	* Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan
				Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon (Elektronik dan Non Elektronik)			* Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
							* Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah

Visi	:	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon Bersih, Inovatif, Maju, Agamis, Aman					
Misi I	:	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel dan profesional					
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	* Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah



2.3 Struktur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Beriku tialah rincian pengelolaan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon Pada Tahun Anggaran 2025.

Tabel 2.3 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Terkait Langsung Pencapaian SasaranTahun 2025

Sasaran		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	218.058.000	208.527.700	-9.530.300
	1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	124.236.400	109.257.900	-14.978.500
	1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	93.821.600	99.269.800	5.448.200
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.870.372.308	5.498.584.308	628.212.000
	2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.738.940.208	5.361.813.208	622.873.000
	2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.275.000	16.275.000	0
	2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	115.157.100	120.496.100	5.339.000
	3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	53.040.000	53.040.000	0
	3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	53.040.000	53.040.000	0
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	356.255.800	315.011.100	-41.244.700
	4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.259.700	5.771.000	-2.488.700
	4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	124.098.000	147.484.000	23.386.000
	4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	44.340.400	42.546.200	-1.794.200
	4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	16.004.000	11.202.700	-4.801.300
	4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28.675.800	27.675.800	-1.000.000
	4.6	Penyediaan Bahan/Material	50.893.000	36.764.200	-14.128.800
	4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.500.000	3.825.000	-675.000
	4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.484.900	39.742.200	-39.742.700
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	937.571.200	937.571.200	0
	6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	577.571.200	577.571.200	0
	6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	360.000.000	360.000.000	0
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.415.000	55.955.000	-23.460.000

Sasaran		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
	7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.015.000	2.015.000	0
	7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.400.000	26.400.000	0
	7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	51.000.000	27.540.000	-23.460.000
Meningkatnya keterbukaan informasi publik		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			0
	1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.683.979.200	2.919.919.200	235.940.000
	1.1	Relasi Media	1.035.183.800	1.032.232.400	-2.951.400
	1.2	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	98.527.100	78.143.100	-20.384.000
	1.3	Dukungan Administrasi Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	317.347.000	321.265.400	3.918.400
	1.4	Pelayanan Informasi Publik	786.549.000	664.714.700	-121.834.300
	1.5	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	240.000.000	240.000.000	0
	1.6	Pengelola Media Komunikasi Publik		432.233.400	432.233.400
	1.8	Penyusunan Konten	206.372.300	151.330.200	-55.042.100
Meningkatkan Kualitas Nilai Domain SPBE		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			
	1	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.436.590.140	6.918.254.040	481.663.900
	2.1	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	157.777.500	137.696.000	-20.081.500
	2.2	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	2.079.061.840	2.071.055.240	-8.006.600
	2.3	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	488.830.000	662.346.000	173.516.000
	2.4	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	200.000.000	249.950.000	49.950.000
	2.5	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	87.799.800	71.896.000	-15.903.800
	2.6	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	3.423.121.000	3.725.310.800	302.189.800
Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
	1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	329.467.900	360.188.800	30.720.900

Sasaran		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
	1.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	329.467.900	360.188.800	30.720.900
Meningkatkan Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
	1	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	119.725.900	96.635.500	-23.090.400
	1.1	Penyediaan Layanan Keamanan informasi pemerintah daerah kab/Kota	119.725.900	96.635.500	-23.090.400
JUMLAH			16.084.475.448	17.363.686.848	1.279.211.400

Sumber : DPPA Diskominfo Kabupaten Cirebon Tahun 2025

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Pada Tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja dikarenakan karena adanya perubahan anggaran yang tercantum dalam DPA Perubahan. Berikut Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Anggaran (Rp.)
1.	Meningkatnya Kualitas Nilai Domain SPBE	Indeks Domain Tata Kelola	Poin	2.97	6.918.254.040
	Aplikasi informatika	Nilai Penyelenggaran TIK	Persen	94	6.918.254.040
2.	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Poin	57	2.919.919.200
	Informasi dan komunikasi publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	Persen	80	2.919.919.200
3.	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral	Indekas Pembanginan Statistik (IPS)	Persen	90	360.188.800
	Penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase perangkat daerah yang memiliki ketersediaan data sesuai dengan prinsip satu data indonesia	Persen	80	360./188.800
4.	Meningkatkan Pengelolaan Persandian dan Kamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Poin	Level 2	96.635.500
	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Tingkat Maturitas Penanganan Insiden	Persen	2,8	96.635.500
5.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai LKIP	Poin	75,75	7.068.689.308
	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Diskominfo	Persen	90,50	1.305.622.300

	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Persen	100	55.955.000
	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	100	5.498.584.308
	Persentase dokumen perencanaan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	100	208.527.700

2.4.1 Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 15.422.176.548,00. Melalui mekanisme perubahan APBD 2025 menjadi Rp. 17.363.686.848,00, dengan rincian belanja operasi Rp. 16.577.693.948,00 dan belanja modal Rp. 785.992.900,00.

2.4.2 Target Belanja Perangkat Daerah

Tabel 2.5 Target Belanja DiskominfoTahun 2025

Kode Rek	Uraian	Jumlah (Rp.)
5.	BELANJA DAERAH	17.363.686.848
5.1.	BELANJA OPERASI	16.577.693.948
5.1.01.	BELANJA PEGAWAI	5.361.813.208
5.1.02.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.215.880.740
5.2.	BELANJA MODAL	785.992.900
5.2.02.	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	785.992.900
	JUMLAH BELANJA	17.363.686.848

Sumber : DPPA Diskominfo Kabupaten Cirebon 2025

2.4.3 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Berikut alokasi anggaran per sasaran strategis pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.6 Alokasi Anggaran per Sasaran

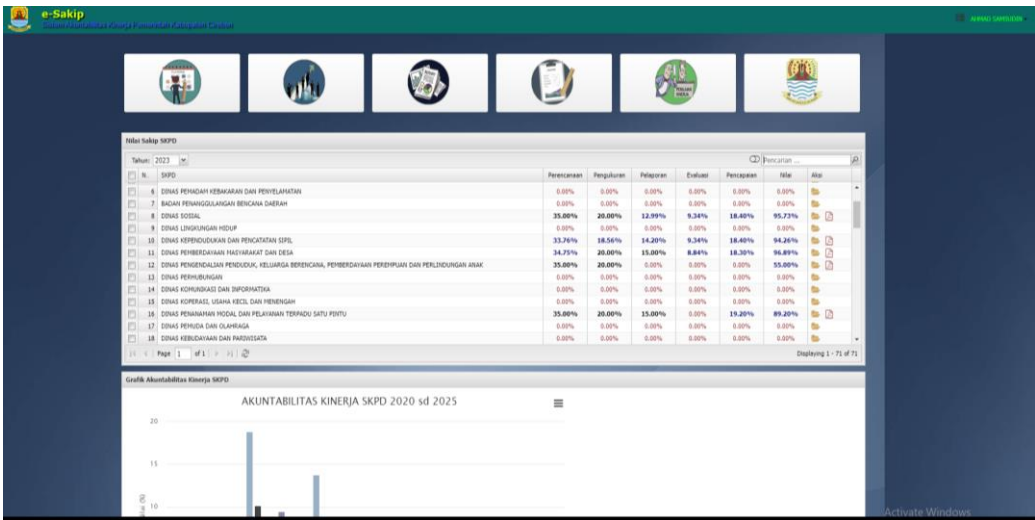
No	Sasaran	Anggaran (Rp.)	Prosentase	Keterangan
1	Meningkatkan Kualitas Nilai Domain SPBE	6.918.254.040	39,84	Didukung oleh 1 (satu) program : Program Aplikasi Informatika
2	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	2.919.919.200	16,81	Didukung oleh 1 (satu) program : Program Informasi dan Komunikasi Publik
3	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral	360.188.800	2,07	Didukung oleh 1 (satu) program : Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4	Meningkatkan Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi	96.635.500	0,55	Didukung oleh 1 (satu) program : Program Penyelenggaraan Persandianuntuk Pengamanan Informasi
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	7.068.689.308	40,70	Didukung oleh 1 (satu) program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota

Sumber :AplikasiSimonek DiskominfoTahun2025

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

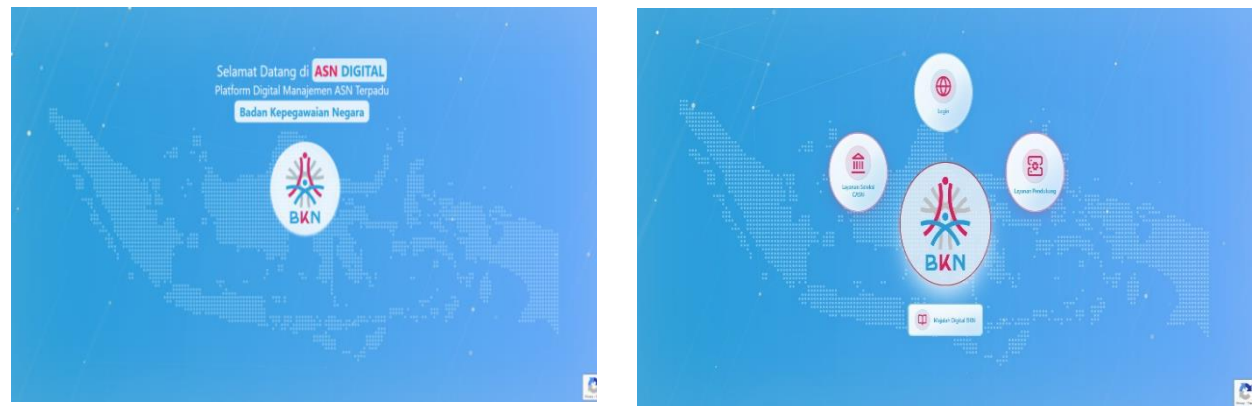
- 1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah aplikasi sakip.cirebonkab.go.id dalam rangka memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja unit kerja di lingkubngan pemerintah Kabupaten Cirebon dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja.

Gambar 2.2 Aplikasi E-SAKIP

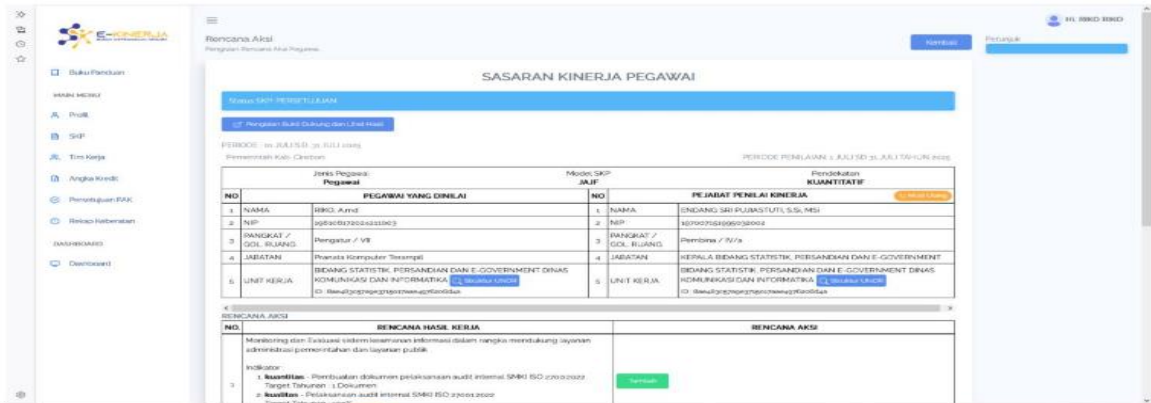


- 2. Aplikasi E-Kinerja BKN merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk memudahkan aparaturnya dalam menginput kegiatan/pekerjaan dan membuat Laporan. Disamping itu aplikasi ini diharapkan mampu menjadi salah satu instrument pendukung bagi pimpinan dalam mengambil Keputusan terkait kinerja pegawai, unit dan satuan kerja.

Gambar 2.3 Aplikasi e-kinerja BKN

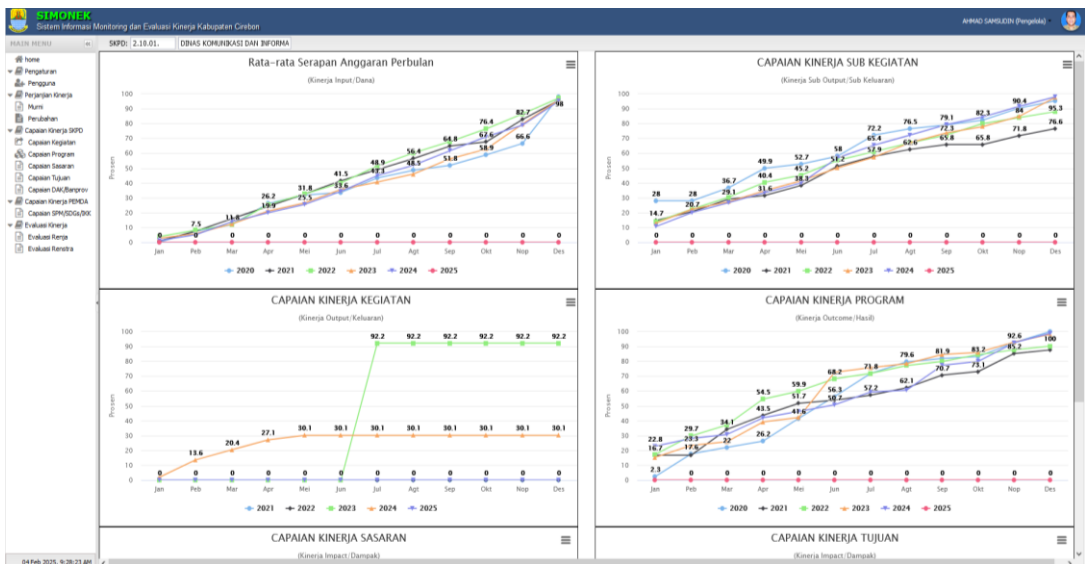


APLIKASI E-KINERJA



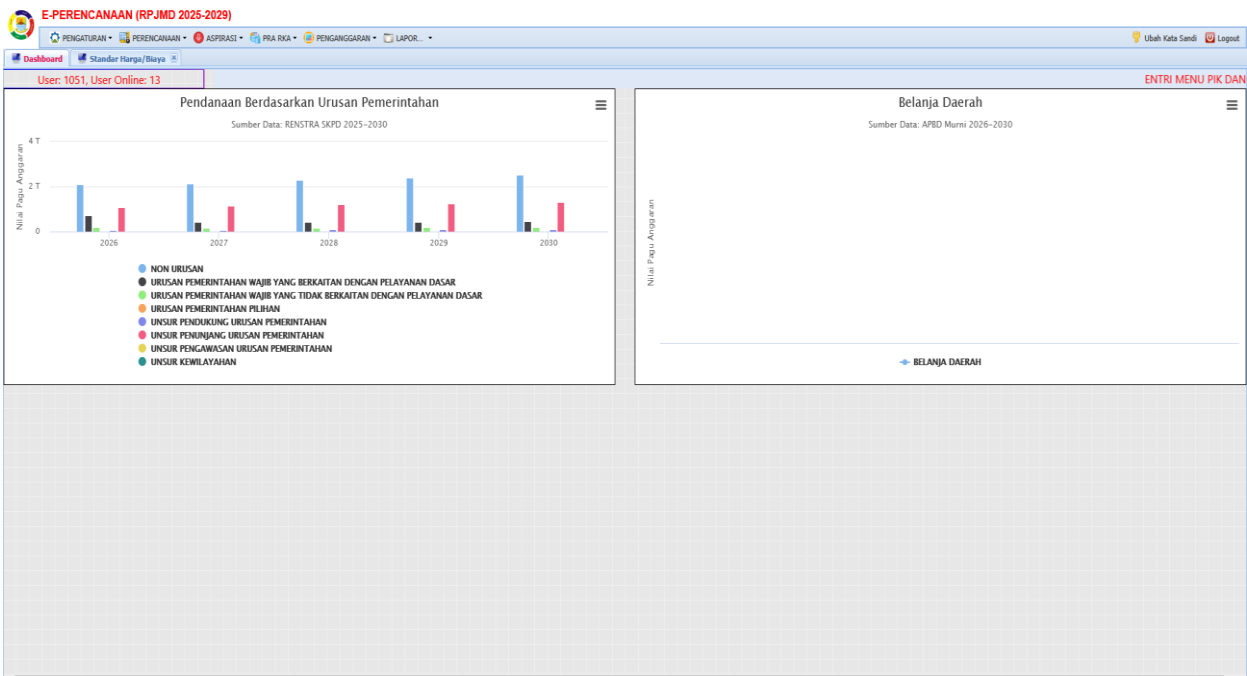
3. Aplikasi Simonek merupakan aplikasi Pengelolaan data kinerja dan pengukuran kinerja pada masing-masing Perangkat Daerah dilakukan secara terpusat dan berkala setiap bulannya menggunakan aplikasi/system informasi berbasis web yaitu melalui *simonek.cirebonkab.go.id*

Gambar 2.4 Aplikasi Simonek



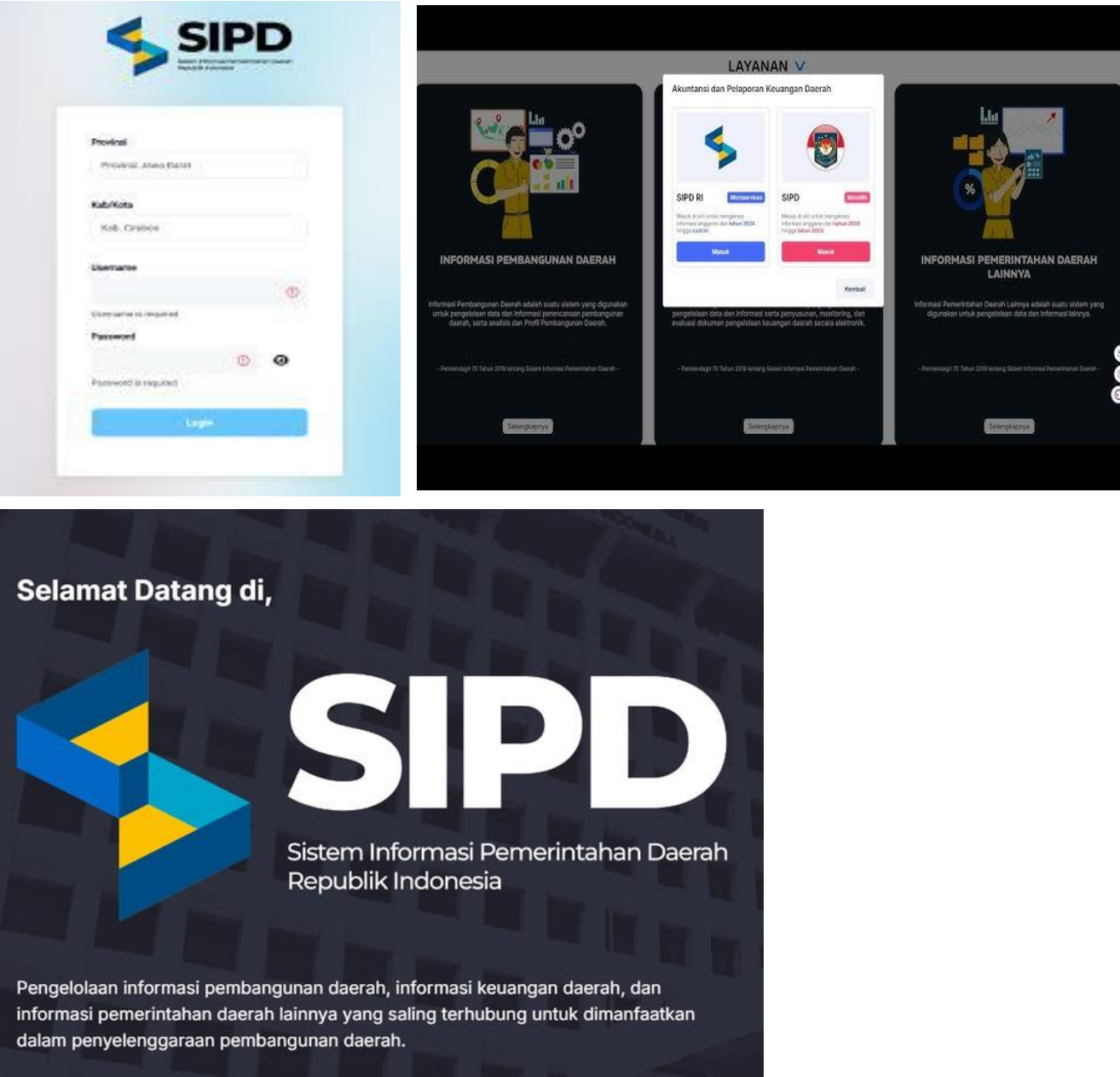
4. Aplikasi E-Perencanaan merupakan sistem perencanaan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung proses perencanaan yang lebih efektif, efisien, dan transparan untuk mendukung pengelolaan anggaran dengan menggunakan sistem pengelolaan anggaran mempergunakan aplikasi/system informasi berbasis web yaitu melalui *perencanaan.cirebonkab.go.id*

Gambar 2.5 Aplikasi E-Perencanaan



5. Aplikasi SIPD merupakan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) adalah sistem informasi yang digunakan untuk mendukung proses Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengelolaan Pembangunan Daerah, termasuk Pengelolaan Anggaran, Waktu, dan Sumberdaya.

Gambar 2.6 Aplikasi SIPD





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- BAB III berisi :**
- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
 - 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
 - 3.3 Efisiensi Anggaran
 - 3.4 Inovasi
 - 3.5 Lintas Sektor

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan Gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan Tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber :Permendagri No 86 Tahun 2017, Hal. 495

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dilakukan pengukuran kinerjanya dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2 Realisasi dan Capaian Kinerja Utama Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025		%Capaian	Kriteria/ Kode
			Target Akhir	Realisasi		
1	Meningkatkan Kualitas Nilai Domain SPBE	<u>Indikator:</u> Indeks Domain Tata Kelola Indeks Domain Layanan SPBE Indeks Domain Manajemen SPBE <u>Meta Indikator :</u> Nilai domain tata kelola SPBE yang dikeluarkan Kemenpan RB	3.15 poin	3.73 poin	119.04	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	<u>Indikator:</u> Indeks Keterbukaan Informasi Publik <u>Meta Indikator :</u> Nilai keterbukaan informasi publik yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat	75 poin	90 poin	120	Sangat Tinggi

3	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral	<u>Indikator:</u> Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral <u>Meta Indikator :</u> Hasil pengolahan data mandiri yang terdiri dari capaian dokumen yang telah disusun dan capaian keterisian data statistic sektoral	80%	90,4%	113	Sangat Tinggi
4	Meningkatkan Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi	<u>Indikator:</u> Indeks Keamanan Informasi <u>Meta Indikator :</u> Nilai hasil penilaian mandiri terkait Tingkat kesiapan keamanan informasi	Level 2	Level 2	100	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	<u>Indikator:</u> Nilai LKIP <u>Meta Indikator :</u> Hasil survei kepuasan aparatur terkait layanan	70,75 Nilai	75,70 Nilai	106,99	Sangat Tinggi

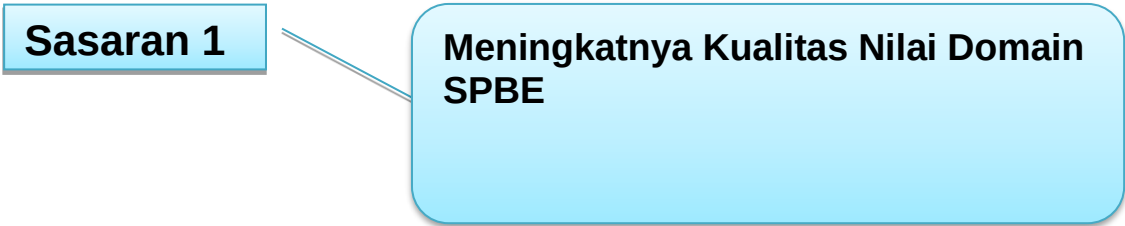
Sumber :Simonek Tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, terdapat 5 (lima) sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dengan 5 (lima) indikator kinerja sarasanya itu Indeks Domain Tata Kelola SPBE, Indeks Keterbukaan Informasi Publik, Persentase Pengelolaan dan Layanan Data Statistik Sektoral, Indeks Keamanan Informasi dan Nilai LKIP. Pada tahun 2025 ini, 5 (lima) indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar (≥ 100%). Indikator yang telah memenuhi target adalah Indeks Domain Tata Kelola SPBE dengan capaian sebesar 119,04%, Indeks Keterbukaan Informasi Publik dengan capaian sebesar 120%, Persentase Pengelolaan dan Layanan Data Statistik Sektoral dengan capaian sebesar 113%. Indeks Keamanan Informasi dengan capaian sebesar 100%, dan Nilai LKIP dengan capaian sebesar 106,99%. Analisis untuk perbandingan antara target dan realisasi sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diuraikan melalui pencapaian indikator kinerja masing-masing sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, sebagai berikut :

3.2.1 Sasaran Strategis ke-1



Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi merupakan upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan

teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hal ini telah diatur dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi yang ada di Pemerintah Kabupaten Cirebon. Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kabupaten Cirebon. Agar penilaian ini dilaksanakan secara efektif dan obyektif, maka Dinas Komunikasi dan Informatika dengan pedoman pada evaluasi yang dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan evaluasi SPBE dan dukungan oleh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Tolok ukur sasaran “**Meningkatkan Nilai Domain Tata Kelola SPBE**”, diukur oleh 1 (satu) indikator yaitu **Indeks Domain Tata Kelola**, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Formulasi Perhitungan Sasaran 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
Meningkatkan Kualitas Nilai Domain SPBE	Indeks Domain Tata Kelola	$= \frac{\sum \text{jawaban} \times \text{bobot}}{\sum \text{pertanyaan}}$	Hasil <i>assessment</i> dan observasi dari Kemenpan RB

Sumber : Dokumen IKU Tahun 2025

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Hasil pengukuran atas indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika tahun 2025 pada sasaran ini menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.4 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Kriteria
		Target	Realisasi	% Capaian	
Meningkatnya Kualitas Nilai Domain SPBE	Indeks Domain Tata Kelola	3.15 poin	3.75 poin	119.04	Sangat Tinggi

Capaian indikator kinerja pada sasaran strategis1 “*meningkatnya Nilai Domain Tata Kelola SPBE*” dengan indikator sasaran “Indeks Domain Tata Kelola” tahun 2025 dengan target 3.15 poin dan terealisasi 3.75 poin sehingga tercapai sebesar 119,04%. Kondisi ini dapat dikatakan termasuk kategori sangat tinggi dan kinerja berjalan sesuai dengan rencana.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Apabila kita membandingkan dengan tahun sebelumnya, maka dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			%Capaian		
		Tahun 2024	Tahun 2025	Capaian	Tahun 2024	Tahun 2025	Capaian%
Meningkatnya Kualitas Nilai Domain SPBE	Indeks Domain Tata Kelola	3.20 poin	3.20 poin	0.23	109,58	119,04	9,47

Berdasarkan tabel tersebut bahwa sasaran “Meningkatnya Kualitas Nilai Domain SPBE” diukur melalui 1 indikator yaitu Indeks Domain Tata kelola menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi kinerja sama sebesar 3.20 poin dan capaian kinerja naik 9,47%.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Periode Tahun 2025-2029

Penjelasan perbandingan realisasi hingga tahun 2025 dengan target akhir renstra dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir Tahun Renstra	% Capaian
Meningkatnya Kualitas Nilai Domain SPBE	Indeks Domain Tata Kelola	3,75 poin	3,15 poin	119,04

Berdasarkan tabel tersebut bahwa sasaran “Meningkatnya Kualitas Nilai Domain SPBE” diukur melalui 1 indikator yaitu Indeks Domain Tata kelola. Pada target akhir Renstra, realisasi mengenai Indeks Domain Tata Kelola SPBE sebesar 3,75 poin, sementara target akhir Renstra adalah 3.15 poin, maka kinerja tercapai 119,04%, sehingga memenuhi target akhir Renstra.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2025 dengan Standar Nasional/RPJMN serta Capaian Organisasi/Instansi Sejenis yang Setara/Sekelas

Realisasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada sasaran “Meningkatnya Kualitas Nilai Domain SPBE” dengan indikator yaitu Indeks Domain Tata kelola tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional/RPJMN maupun capaian organisasi/instansi sejenis yang setara/sekelas. Hal tersebut disebabkan tidak diperolehnya data yang akurat untuk pengukuran indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja sasaran SPBE ini adalah meningkatkan program aplikasi informatika khususnya pelaksanaan SPBE di Kabupaten Cirebon. Kondisi lainnya yang mendukung keberhasilan capaian kinerja ini yaitu:

- 1. Aspek kebijakan internal tata Kelola SPBE : dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Diskominfo telah Menyusun dokuemen arsitektur dan peta rencana SPBE yang merupakan dokumen perencanaan Pembangunan yang berkaitan dengan digitalisasi pemerintahan khususnya di Kabupaten Cirebon.
- 2. Aspek layanan publik berbasis elektronik : dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menerapkan sistem interoperabilitas sistem dan juga menggunakan layanan aplikasi umum yang digunakan secara Nasional, sehingga konsep kebijakan pemerintah pusat dengan daerah dapat berjalan secara dinamis.
- 3. Aspek kebijakan SPBE : dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Cirebon telah melaksanakan penyelenggaraan SPBE secara terkoordinir secara baik dikarenakan peran dari TIM SPBE sudah tersusun dengan baik.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat Efisiensi (TE) pada sasaran “Meningkatnya Kualitas Nilai Domain SPBE” diukur melalui 1 indikator yaitu Indeks Domain Tata kelola dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.7 Tingkat Efisiensi Sasaran 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Kinerja			Keuangan			TE	KATEGORI
			Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian		
1	Meningkatnya Kualitas Nilai Domain SPBE	Indeks Domain Tata Kelola	3,15	3,75	119,04	6.918.254.040	6.896.872.210	99,69	1,89	Efisien

Ket : Formulasi perhitungan Tingkat Efisiensi terlampir

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa % capaian kinerja sasaran ini 119,04% dan capaian keuangan sebesar 99,69% dan tingkat efisiensi 1,89. Sehingga tingkat efisiensi pada sasaran ini dikategorikan efisien.

G. Analisis Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis ke-1

Dalam mencapai sasaran strategis ke-1 ini didukung oleh 1 (satu) program 1 (dua) kegiatan dan 6 (tujuh) sub kegiatan, dengan total anggaran **Rp. 6.918.254.040,00** atau **39,84%** dari anggaran total Belanja, dengan capaian realisasi keuangan sebesar **Rp. 6.896.872.210,00** atau **99,69%** dan realisasi fisik 100%, terdapat efisiensi/sisa anggaran sebesar **Rp. 21.381.830,00**.

Tabel 3.9 Program dan Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis 1

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Realisasi Fisik	Efisiensi/ Sisa Anggaran	
		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(%)
I	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	6.918.254.040	6.896.872.210	99,69	100	21.381.830	0,31
1	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	6.918.254.040	6.896.872.210	99,69	100	21.381.830	0,31
1.1	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	137.696.000	137.062.748	99,54	100	633.252	0,46
1.2	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	2.071.055.240	2.060.744.259	99,50	100	10.310.981	0,50
1.3	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	662.346.000	660.038.060	99,65	100	2.307.940	0,35
1.4	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	249.950.000	249.750.000	99,92	100	200.000	0,08
1.5	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	71.896.000	69.756.000	97,02	100	2.140.000	2,98
1.6	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	3.725.310.800	3.719.521.143	99,84	100	5.789.657	0,16
JUMLAH		6.918.254.040	6.918.254.040	99,69	100	21.381.830	0,31

Berikut dokumentasi kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada sasaran ini dengan ditunjang infrastruktur yang cukup memadai.

Penguatan Infrastruktur IT



- Pembangunan Videotron
- Pengelolaan layanan jaringan internet
- Pembangunan Hotspot Area Publik



Manajemen Data dan Integrasi Sistem



- Penyediaan layanan server
- Pengelolaan Command Center
- Pengelolaan CCTV Kabupaten Cirebon (Socakaton)
- Pengelolaan Virtual Meeting



Statistik Sektoral

- Buku Statistik Daerah
- Forum Satu data Kabupaten Cirebon
- Pelatihan Petugas Pengelola Data Perangkat Daerah (Kecamatan)
- Pelatihan data geospasial
- Pelatihan CIREBON SMART VILLAGE
- Pengembangan Aplikasi Satu Data dan Geoportal
- Dashboard Desa
- Pusdatin



Aplikasi Persandian

- Pembangunan Sistem Informasi Telekomunikasi Infrastruktur Pasif
- Pengembangan Sistem Informasi PPID
- Pengembangan Website Cirebonkab
- LMS Government University Pengembangan Sistem Informasi Desa
- Pembangunan Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat
- Pembangunan Sistem Informasi Lansia
- Pengembangan Cirebon smart city (Sistem Perhubungan)
- Aplikasi UMKM
- Aplikasi Wakaf Buku

**Persandian dan
Keamanan Informasi**

- Layanan Kedaruratan 112
- Layanan Keamanan Informasi ISO 27001 = 2022
- Layanan Call Center 112

E-Government

- Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Penatakelolaan Kota Cerdas
- LMS Government University



3.2.2 Sasaran Strategis ke-2



Meningkatnya keterbukaan informasi publik merupakan suatu bentuk upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah atau lembaga publik. Keterbukaan informasi publik bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat terhadap informasi yang dimiliki oleh pemerintah atau lembaga publik. Hal ini mencakup penyediaan informasi yang jelas, mudah diakses, dan dapat dipahami oleh masyarakat umum. Adapun rentang nilai peringkat yang menggambarkan sejauhmana keterbukaan informasi publik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

Tabel 3.9 Rentang Nilai Predikat

No	Predikat	Nilai
1	Informatif	80% - 100%
2	Menuju Informatif	60% - 79,9%
3	Cukup Informatif	40% - 59,9%
4	Kurang informatif	20% - 39,9%
5	Tidak Informatif	0% - 19,9%

Sumber : Laporan Kegiatan Monev dan Peningkatan Badan Publik, 2025

Tolok ukur capaian sasaran **“Meningkatkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik”**, diukur oleh 1 (satu) indikator yaitu **Indeks Keterbukaan Informasi Publik**, dengan hasil capaian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10 Formulasi Perhitungan Sasaran 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	$= \frac{(\text{Verifikasi SAQ} + \text{VLA} + \text{Visitasi})}{\text{Total Komponen}}$ SAQ = Self Assessment Quesioner VLA = Verifikasi Lanjutan Acak	Hasil <i>self assessment</i> dan observasi dari Komisi Informasi

Sumber : Dokumen IKU Tahun 2025

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Hasil pengukuran atas indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Tahun 2025 pada sasaran ini menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.11 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Kriteria
		Target	Realisasi	% Capaian	
Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	75 poin	90 poin	120	Sangat Tinggi

Capaian indikator kinerja pada sasaran strategis 2 “*meningkatnya Indeks keterbukaan informasi publik*” dengan indikator sasaran “Indeks Keterbukaan Informasi Publik” tahun 2025 dengan target 75 poin dan terealisasi 90 poin sehingga tercapai sebesar 120%. Kondisi ini dapat dikatakan termasuk kategori sangat tinggi dan dapat dikatakan bahwa kinerja berjalan sesuai dengan rencana.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Apabila kita membandingkan dengan tahun sebelumnya, maka dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			%Capaian		
		Tahun 2024	Tahun 2025	Capaian	Tahun 2024	Tahun 2025	%Capaian
Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	90	90	100	157,89	120	-37,89

Berdasarkan tabel tersebut bahwa sasaran “*meningkatnya pelayanan informasi dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik*”, diukur oleh 1 (satu) indikator yaitu Indeks Keterbukaan Informasi Publik, menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi kinerja relatif sama sebesar 90 poin dan capaian kinerja pun menurun 37,89%.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Periode Tahun 2025-2029

Penjelasan perbandingan realisasi hingga tahun 2025 dengan target akhir renstra dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir Tahun Renstra	% Capaian
Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	90 poin	75 poin	120

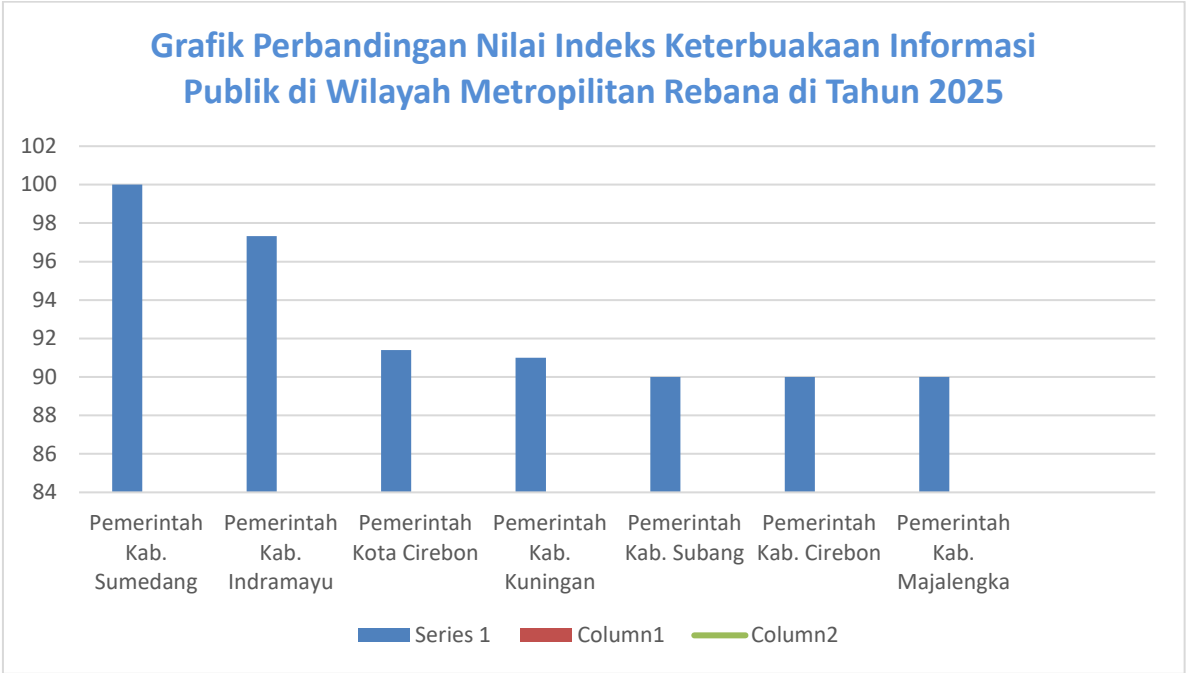
Berdasarkan tabel tersebut bahwa sasaran “*meningkatnya Indeks keterbukaan informasi publik*”, diukur oleh 1 (satu) indikator yaitu Indeks Keterbukaan Informasi Publik, menunjukkan bahwa capaian antara realisasi sasaran ini sebesar 90 poin terhadap target akhir renstra sebesar 75 poin yaitu 120% sehingga telah melampaui target yang telah ditentukan.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2025 dengan Standar Nasional/RPJMN serta Capaian Organisasi/Instansi Sejenis yang Setara/Sekelas

Realisasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada sasaran *meningkatnya Indeks keterbukaan informasi publik dengan indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik* tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional/RPJMN maupun capaian organisasi/instansi sejenis yang setara/sekelas. Hal tersebut disebabkan tidak diperolehnya data yang akurat untuk pengukuran

indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra. Namun demikian pada Sasaran ini dapat dibandingkan sebagaimana nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang ada di lingkup Provinsi Jawa Barat. Berikut kami sandingkan nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang berada di wilayah Kawasan Metropolitan Rebana.

Tabel 3.14 Grafik Perbandingan Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik di wilayah Metropolitan Rebana di Tahun 2025



Sumber : Keputusan KI Provinsi Jabar No. 006/SK/KI-JBR/XI/2025 Tahun 2025 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Jawa Barat Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas data diketahui bahwa capaian nilai Pemerintah Kabupaten Cirebon Indeks keterbukaan Informasi Publik pada Tahun 2025 berada pada urutan kelima dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Kawasan Metropolitan Rebana. Pemerintah Kabupaten Cirebon dikualifikasikan Pemerintah Kabupaten/Kota *Informatif* dimana merupakan predikat paling tinggi dalam penilaian indeks keterbukaan informasi publik.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah meningkatnya program informasi dan komunikasi publik. Kondisi lainnya yang mendukung keberhasilan capaian kinerja ini yaitu :

- (1) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik melalui berbagai media meliputi media massa (surat kabar, Radio, TV), media baru (media online), media tradisional, media interpersonal dan media luar ruang.
- (2) Media Massa : Dalam pengelolaan media massa, Dinas Komunikasi dan informatika bekerjasama dengan Surat Kabar Lokal, TV Lokal dan Radio Lokal dalam mendiseminasikan program, kebijakan pemerintah dan pemerintah pusat.
- (3) Media Baru : Dalam pengelolaan media baru/online Dinas Komunikasi dan informatika melaksanakan 4 (empat) kegiatan yaitu:

- a) Website *diskominfo.cirebonkab.go.id*, dimana Dinas Komunikasi dan informatika mengoptimalkan website Dinas dengan berbagai macam konten yang memuat informasi-informasi seputar dokumen kedinasan ataupun dokumentasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Cirebon. Selain itu konten informasi juga melalui media sosial seperti instagram, facebook dan youtube.
 - b) Pengelolaan media sosial seperti *facebook*, *instagram*, *youtube* dan *twitter* dalam rangka mengoptimalkan diseminasi informasi kepada masyarakat yang lebih luas dan efektif.
 - c) Iklan Layanan Masyarakat, merupakan media informasi terkait program pembangunan pemerintah daerah seperti program stunting, program keluarga berencana dan yang lainnya yang disampaikan melalui media *online*.
 - d) Pengelolaan Saber Hoaks Kabupaten Cirebon merupakan salah satu inovasi dalam meningkatkan peran dan fungsi Diskominfo dalam diseminasi informasi. Dengan adanya Saber Hoaks Kabupaten Cirebon ditujukan untuk memverifikasi informasi atau rumor yang belum jelas fakta-faktanya yang beredar di tengah masyarakat. Dalam pengelolaannya Diskominfo bekerjasama dengan RTIK Kabupaten Cirebon dan Komunitas Halaman Literasi.
- (4) Media tradisional : Penyebarluasan informasi program-program dan kebijakan serta peningkatan pelayanan publik oleh pemerintah daerah merupakan sarana alternatif yang cukup efektif melalui pertunjukan rakyat tradisional. Dalam kegiatannya, Dinas Komunikasi dan informatika berkolaborasi dengan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK METRA) Kabupaten Cirebon.
- (5) Media interpersonal : Media interpersonal meliputi kegiatan sosialisasi, pembinaan, pelatihan, forum komunikasi dan lain sebagainya. Dinas Komunikasi dan informatika berupaya meningkatkan peran dan fungsi melalui kegiatan tersebut seperti pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
- (6) Media luar ruang merupakan salah satu penyebarluasan informasi kepada masyarakat baik berupa banner dan melalui wawar mobil keliling.
- (7) Selain 5 (lima) media diatas, secara teknis dalam meningkatkan nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik yaitu :
- a) Adanya SOP dalam memfasilitasi keterbukaan informasi publik;
 - b) Sumber daya yang ada dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik cukup memadai dengan mengoptimalkan sumber daya manusia dan *portal website ppid.cirebonkab.go.id* dalam mempublikasikan data dan informasi.
 - c) Komunikasi antara pembuat kebijakan dengan para implementor sudah berjalan dengan cukup baik karena pelayanan dan ketepatan waktu yang jelas oleh pegawai. Namun, komunikasi antara implementor dengan publik dalam menyebarluaskan informasi perlu dioptimalkan.
 - d) Sikap-sikap implementor dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik, dapat dikatakan baik karena berupaya mematuhi peraturan, saling mendukung antara pihak-pihak yang terkait juga adanya kerjasama yang dilakukan oleh implementor merupakan sikap-sikap yang mampu menunjang terjadinya implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik menjadi lebih maksimal.

Terkait hal tersebut, maka upaya-upaya agar mempertahankan bahkan meningkatkan capaian kinerja sasaran ini yaitu antara lain :

- (1) **Penyelarasan Strategi Media** : Rancang strategi terpadu yang mencakup semua jenis media untuk memastikan pesan konsisten dan efektif disampaikan melalui berbagai saluran.
- (2) **Analisis Kinerja** : Lakukan analisis kinerja secara teratur untuk mengidentifikasi tren, kelemahan, dan potensi perbaikan dalam penggunaan setiap jenis media.
- (3) **Peningkatan Konten** : Fokus pada pengembangan konten yang relevan, menarik, dan memberikan nilai tambah kepada masyarakat.
- (4) **Pemanfaatan Teknologi** : Manfaatkan teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan media, seperti analisis data, kecerdasan buatan, dan alat manajemen media.
- (5) **Optimasi Platform Online** : Perbarui dan optimalkan platform online, termasuk situs web dan media sosial, untuk meningkatkan visibilitas dan keterlibatan pengguna.
- (6) **Kemitraan Media** : Bangun kemitraan dengan media lainnya untuk meningkatkan jangkauan dan dukungan, baik secara online maupun offline.
- (7) **Data dan Informasi** : Agar data dan informasi disampaikan secara transparan, jelas dan wajar.
- (8) **Partisipasi masyarakat** : agar komunikasi Keterbukaan Informasi Publik antar pegawai dengan masyarakat lebih diutamakan dibanding penyampaian informasi melalui media.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat Efisiensi (TE) pada sasaran “*meningkatnya Indeks keterbukaan informasi publik*”,diukur melalui 1 indikator yaitu Indeks Keterbukaan Informasi Publik dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.15 Tingkat Efisiensi Sasaran 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Kinerja			Keuangan			TE	KATEGORI
			Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian		
1	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	75	90	120	2.919.919.200	2.908.242.797	99,60	0,81	Efisien

Ket : Formulasi perhitungan Tingkat Efisiensi terlampir

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa % capaian kinerja sasaran ini 120% dan % capaian keuangan sebesar 99,60% dan tingkat efisiensi 0,81. Sehingga tingkat efisiensi pada sasaran ini dikategorikan efisien.

G. Analisis Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis ke-2

Dalam mencapai sasaran strategis ke-2 ini didukung oleh 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan, dengan total anggaran Rp. 2.919.919.200,00 atau 16,81% dari anggaran total Belanja, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 2.908.242.797,00 dan realisasi fisik 100%, terdapat efisiensi /sisa anggaran sebesar Rp 11.676.403,00.

Tabel 3.16 Program dan Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis 2

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Realisasi Fisik	Efisiensi/ Sisa Anggaran	
		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(%)
I	Program Informasi dan Komunikasi Publik	2.919.919.200	2.908.242.797	99,60	100	11.676.403	0,40
1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.919.919.200	2.908.242.797	99,60	100	11.676.403	0,40
1.2	Relasi Media	1.032.232.400	1.032.221.753	100,00	100	10.647	0,00
1.3	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	78.143.100	72.824.848	93,19	100	5.318.252	6,81
1.4	Dukungan Administrasi Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	321.265.400	321.186.501	99,98	100	78.899	0,02
1.5	Pelayanan Informasi Publik	664.714.700	663.154.753	99,77	100	1.559.947	0,23
1.6	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	240.000.000	239.400.000	99,75	100	600.000	0,25
1.7	Pengelola Media Komunikasi Publik	432.233.400	428.345.388	99,10	100	3.888.012	0,90
1.8	Penyusunan Konten	151.330.200	151.109.554	99,85	100	220.646	0,15
	JUMLAH	2.919.919.200	2.908.242.797	99,60	100	11.676.403	0,40

Berikut kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada sasaran ini.

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik



- Pengelolaan Tim dan media social saber Hoaks Kabupaten Cirebon (IG: cirebonkabsberhoaks, FB: Saber Hoaks Kabupaten Cirebon)
- Peliputan kegiatan pimpinan daerah dan perangkat daerah Kab. Cirebon
- Pengelolaan website Pemerintah Kabupaten Cirebon (www.cirebonkab.go.id) dan website Dinas (www.diskominfo.cirebonkab.go.id)
- Pengelolaan media sosial Pemkab Cirebon (IG: cirebonkab, FB: Cirebonkab)
- Pengelolaan media sosial Dinas (IG: diskominfokabcirebon, FB: diskominfokabcirebon, Tiktok: humas_IKP_cirkab)
- Pengelolaan kanal youtube Pemkab Cirebon (Cirebon TV)

Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik



- Diseminasi program pemerintah daerah melalui media luar ruang (banner, spanduk, videotron dan leaflet)
- Diseminasi program pemerintah daerah melalui TV Lokal dan kanal Youtube Cirebonkab TV
- Diseminasi program pemerintah daerah melalui Mobil Wawar Keliling
- Diseminasi program pemerintah daerah melalui media online, media cetak lokal dan regional
- Diseminasi program pemerintah daerah melalui Radio
- Diseminasi program pemerintah daerah melalui pertunjukan rakyat tradisional

Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik



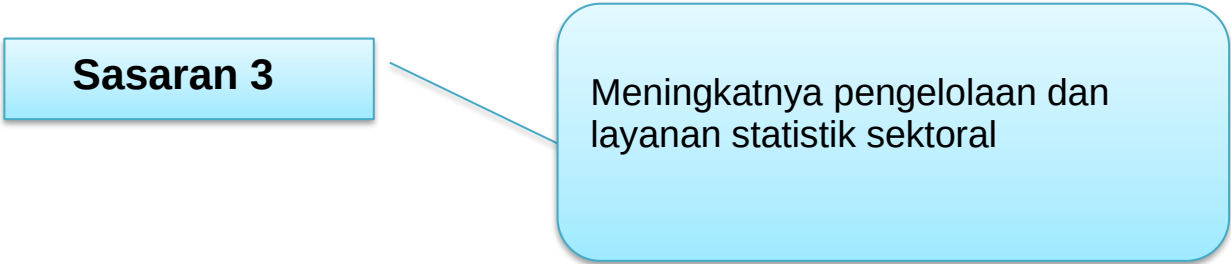
- Pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Fasilitasi sengketa Informasi Publik



- Operasional Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon
- Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik

3.2.3 Sasaran Strategis ke-3



Pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data statistik yang berkaitan dengan sektor-sektor kunci dalam pemerintahan dan pembangunan daerah. Strategi pencapaian sasaran ini pada tahun 2025 ditunjang dengan adanya pemanfaatan aplikasi portal data sebagai wadah untuk menampung dan menampilkan data sektoral yang telah dikumpulkan dari masing-masing produsen data, dan telah meninggalkan sistem pengumpulan data yang manual. Telah dilaksanakannya rapat bersama pengembang aplikasi serta perwakilan dari bidang-bidang untuk memberikan saran terkait pengembangan dan pemeliharaan aplikasi portal data yang sesuai aturan yang berlaku.

Tolok ukur capaian sasaran “**meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral**”, diukur oleh 1 (satu) indikator yaitu **Indeks Pembangunan Statistik (IPS)**, dengan hasil capaian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.17 Formulasi Perhitungan Sasaran 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	$= \frac{(\% \text{ dokumen yang dihasilkan} + \% \text{ keterisian data SIPD})}{\text{Total Komponen}} \times 100\%$	Hasil <i>assessment</i> dan observasi dari Kemenpan RB

Sumber : Dokumen IKU Tahun 2025

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Capaian indikator kinerja pada sasaran strategis 3 “*meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral*” dengantarget yang ditetapkan tahun 2025 pada indikator sasaran ini adalah 90% dengan realisasi 90% atau 100% sehingga masuk kriteria sangat tinggi.

Tabel 3.18 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Kriteria
		Target	Realisasi	% Capaian	
Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	90%	90%	100	Sangat tinggi

Perhitungan dari capaian sasaran ini terdiri dari 2 (dua) komponen penunjang yaitu:

- 1) Persentase dokumen statistik yang dihasilkan, dengan target 90% dari target akhir Renstra
- 2) Persentase keterisian data yang dikelola, dengan target 90% pada tahun 2025.

Dan rumus perhitungannya sebagai berikut:

$$= \frac{(\% \text{ dokumen yang dihasilkan} + \% \text{ keterisian data pada opendata})}{\text{Total Komponen}} \times 100\%$$

Pada komponen *“persentase dokumen statistik yang dihasilkan”*, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon melalui Bidang Statistik, Persandian dan E-Government telah menyusun Buku Statistik Daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa target **90%** telah didapat.

Sementara maksud dari komponen *“presentase keterisian data yang dikelola”* adalah keterisian data *opendata.cirebonkab.go.id* yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon. Sampai dengan Bulan Desember 2025, keterisian data *opendata.cirebonkab.go.id* melebihi ekspektasi yang berawal target hanya 90% justru keterisian Data mencapai 90%, yang terdiri dari :

- Total elemen data adalah 1571 data; dan
- Elemen data yang sudah terisi adalah 1571 data.

Dengan demikian, kita dapat melakukan pengukuran dalam pencapaian sasaran kinerja ini:

$$\begin{aligned} &= \frac{(\% \text{ dokumen yang dihasilkan} + \% \text{ keterisian data pada opendata})}{\text{Total Komponen}} \times 100 \\ &= \frac{(90\% + 90\%)}{2} \\ &= \frac{(180\%)}{2} \\ &= 90\% \end{aligned}$$

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Apabila kita membandingkan dengan tahun sebelumnya, maka dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			%Capaian		
		Tahun 2024	Tahun 2025	Capaian	Tahun 2024	Tahun 2025	Capaian%
Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	90%	90%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel tersebut bahwa sasaran “Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah” diukur melalui 1 indikator yaitu Persentase pegelolaan dan layanan statistik sektoral menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, **realisasi kinerja meningkat sebesar 100%** sementara **capaian kinerja tetap 90%**.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Periode Tahun 2025-2029

Penjelasan perbandingan realisasi hingga Tahun 2025 dengan Target Renstra dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir Tahun Renstra	% Capaian
Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	90%	90%	100

Berdasarkan tabel tersebut bahwa sasaran “Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral” diukur melalui 1 indikator yaitu Persentase pegelolaan dan layanan statistik sektoral. Pada target akhir Renstra, realisasi mengenai Persentase pegelolaan dan layanan statistik sektoral sebesar 90% sementara target akhir Renstra adalah 90%, maka kinerja baru tercapai 100 %, sehingga belum memenuhi target akhir Renstra.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2025 dengan Standar Nasional/RPJMN serta Capaian Organisasi/Instansi Sejenis yang Setara/Sekelas

Persentase pegelolaan dan layanan statistik sektoral merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data statistik yang berkaitan dengan sektor-sektor kunci dalam pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Cirebon. Indikator kinerja ini merupakan indikator yang dirumuskan secara mandiri oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, belum ditemukan indikator serupa

pada tingkat nasional maupun pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain, sehingga tidak dapat membandingkan terhadap standar nasional/RPJMN atau instansi sejenis setara/sekelas lainnya.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian sasaran ini dipengaruhi oleh meningkatnya penyelenggaraan statistik sektoral oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon. Kondisi lainnya yang mendukung capaian kinerja ini antara lain:

- (1) Adanya komitmen pimpinan dalam mencapai target keterisian data pada *opendatacirebonkab.go.id* sehingga melampaui dari target yang ditetapkan.
- (2) Terpenuhinya target penyusunan dokumen statistik yang merupakan salah satu komponen dalam pengukuran capaian kinerja.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika selaku walidata telah menyusun daftar data statistik sektoral dan data geospasial yang ada pada seluruh Perangkat Daerah. Daftar data itu menjadi acuan bagi Perangkat Daerah untuk mengirimkan data-data yang sesuai kewenangannya untuk dikirimkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Walidata.
- (4) Data-data yang dikelola pada portal Satu Data Kabupaten Cirebon menjadi pusat data Kabupaten Cirebon dan dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Cirebon No. 56 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Cirebon Pasal 4 Huruf (b) dan (d) yang berbunyi: *"Peraturan Bupati ini bertujuan untuk : mengatur tata kelola data di Pemerintah Daerah agar terwujud satu basis data pembangunan yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan (Interoperabilitas)"; dan "mewujudkan perencanaan yang berkualitas, pelaksanaan dan pengendalian yang efektif, monitoring dan evaluasi pembangunan yang terukur dan komprehensif serta perumusan kebijakan pembangunan Daerah yang berbasis data dan tepat sasaran"*.

Terkait hal tersebut diatas, maka upaya-upaya agar capaian kinerja sasaran ini tetap baik atau bahkan lebih baik yaitu antara lain :

- (1) Bekerjasama dengan BPS untuk melaksanakan penyusunan metadata ke perangkat daerah.
- (2) Melaksanakan TOT Pengelolaan Data.
- (3) Peningkatan infrastruktur statistik dalam mengembangkan portal geospasial Kabupaten Cirebon dan melakukan sosialisasi portal open data Kabupaten Cirebon kepada seluruh perangkat daerah.
- (4) Melaksanakan pembinaan bagi Petugas Pengelola Data.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat Efisiensi (TE) pada sasaran *"Meningkatnya* pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam" diukur melalui 1 indikator yaitu Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.21 Tingkat Efisiensi Sasaran 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Kinerja			Keuangan			TE	KATEGORI
			Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian		
1	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	90	90	100	360.188.800	360.074.296	99,97	0,0	Efisien

Ket : Formulasi perhitungan Tingkat Efisiensi terlampir

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa % capaian kinerja sasaran ini 100% dan % capaian keuangan sebesar 99,97% dan tingkat efisiensi 0,011. Sehingga tingkat efisiensi pada sasaran ini dikategorikan efisien

G. Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis ke-3

Dalam mencapai sasaran strategis ke-3 ini didukung oleh 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, dengan total anggaran Rp 360.188.800,00 atau 2,07% dari anggaran total Belanja, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.360.074.296,00 dan realisasi fisik 100%, terdapat efisiensi/sisa anggaran sebesar Rp 114.504,00.

Tabel 3.22 Program dan Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis 3

No	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Realisasi Fisik	Efisiensi/ Sisa Anggaran	
		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(%)
I	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	360.188.800	360.074.296	99,97	100	114.504	0,03
1	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	360.188.800	360.074.296	99,97	100	114.504	0,03
1.4	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	360.188.800	360.074.296	99,97	100	114.504	0,03
	JUMLAH	360.188.800	360.074.296	99,97	100	114.504	0,03

Berikut *output* dari sub kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada sasaran ini.

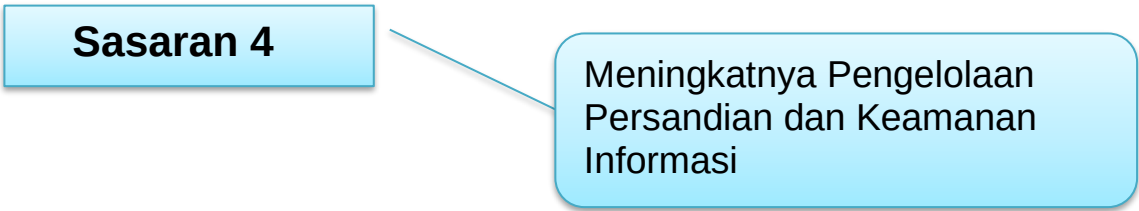
Penyelenggaraan Statistik Sektoral



- Buku Statistik Daerah
- Pendampingan penyusunan metadata
- Forum Satu data Kabupaten Cirebon
- Diseminasi data pembangunan Tingkat Kecamatan
- Pelatihan data geospasial
- Pelatihan pengelola aplikasi satu data



3.2.4 Sasaran Strategis ke-4



Terwujudnya penyelenggaraan persandian merupakan upaya yang dilakukan untuk menciptakan sistem keamanan informasi yang kuat. Pada saat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, faktor keamanan informasi merupakan aspek yang sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini karena digitalisasi proses kerja menjadikan keamanan informasi menjadi hal yang berpengaruh pada keseluruhan proses kerja sehingga sangat penting untuk menjadi perhatian utama. Adapun Indeks Keamanan Informasi (KAMI) adalah Alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi/ memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan Instansi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001. Dengan adanya urusan persandian yang diampu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, maka diupayakan dalam penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi dapat dilaksanakan dengan baik.

Tolok ukur capaian sasaran **“Meningkatnya Kematangan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah”**, diukur oleh1 (satu) indikator yaitu **Indeks Keamanan Informasi**, dengan hasil capaian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.23 Formulasi Pengukuran Sasaran 4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Keamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi	$= \frac{\sum \text{jawaban} \times \text{bobot}}{\sum \text{pertanyaan}}$	Hasil <i>assessment</i> berdasarkan pedoman/instrumen <i>assessment</i> keamanan informasi / Self Assesment

Sumber : Dokumen IKU tahun 2025

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Hasil pengukuran atas indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika tahun 2025 pada sasaran ini menunjukkan hasil sebagai berikut:

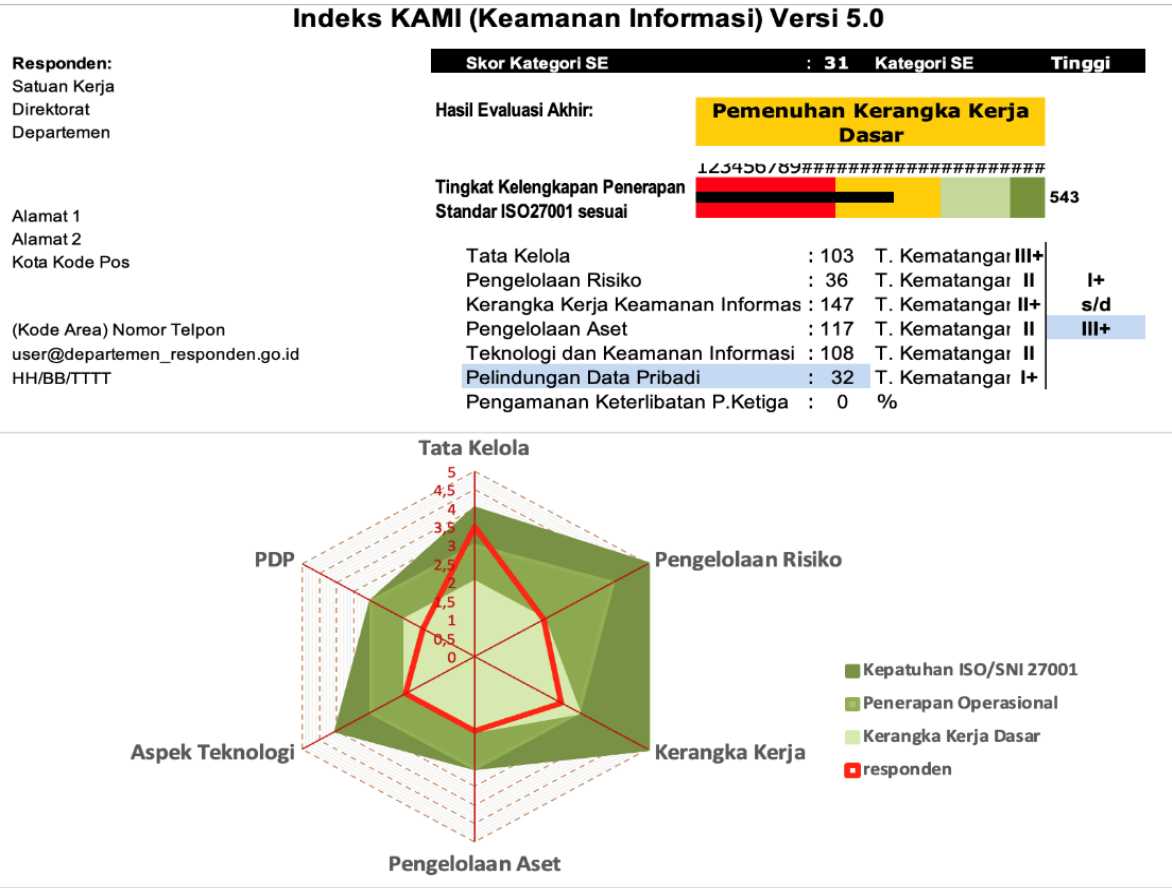
Tabel 3.24 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran 4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Kriteria
		Target	Realisasi	% Capaian	
Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Keamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi	Level II	Level II	100	Sangat Tinggi

Capaian indikator kinerja pada sasaran strategis1 **“Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Keamanan informasi ”**dengan indikator sasaran **“Indeks Keamanan Informasi**

tahun 2025 dengan **target berada pada Level II** dan **teralisasi Level II** sehingga **tercapai sebesar 100%**. Kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja berjalan sesuai dengan rencana.

Pada tahun 2025, Pengukuran nilai Indeks Keamanan Informasi dilakukan melalui Penilaian Mandiri atau *Self Assessment*. Berikut hasil evaluasi tingkat kematangan keamanan informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.



Tabel 3.23 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			%Capaian		
		Tahun 2024	Tahun 2025	Capaian	Tahun 2024	Tahun 2025	Capaian%
Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Keamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi	Level II	Level II	100	100	100	100

Berdasarkan tabel tersebut bahwa sasaran “Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi ” diukur melalui 1 indikator yaitu Indeks Keamanan informasi menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi kinerja sama dengan tahun sebelumnya dan capaian kinerja juga tetap sama dengan tahun sebelumnya.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2025 dengan Target Renstra Periode Tahun 2025-2029

Penjelasan perbandingan realisasi hingga Tahun 2025 dengan Target Renstra dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir Tahun Renstra	% Capaian
Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Keamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi	Level II	Level II	100

Berdasarkan tabel di atas bahwa sasaran “Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Kemanan Informasi” diukur melalui 1 indikator yaitu Indeks Keamanan Informasi. Pada target akhir Renstra, realisasi mengenai Indeks Keamanan Informasi adalah Level II, sementara target akhir Renstra adalah Level II, maka kinerja ini telah tercapai 100%, sehingga telah memenuhi target akhir Renstra.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2025 dengan Standar Nasional/RPJMN serta Capaian Organisasi/Instansi Sejenis yang Setara/Sekelas

Realisasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada sasaran “Meningkatnya Persandian dan Keamanan Informasi” dengan indikator yaitu Indeks Keamanan Informasi tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional/RPJMN maupun capaian organisasi/instansi sejenis yang setara/sekelas. Hal tersebut disebabkan tidak diperolehnya data yang akurat untuk pengukuran indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian ini antara lain :

- (1) Adanya dukungan dari konsultan dalam penyelenggaraan persandian.

Meskipun memenuhi target yang diharapkan, namun terdapat hambatan dalam mencapai sasaran strategis ini, diantaranya :

- (1) Urusan persandian masih dianggap sebelah mata dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari sisi anggaran yang hanya 0,55% dari total belanja anggaran dinas tahun 2025.
- 1) Belum adanya regulasi/ dasar hukum yang mengatur tentang keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- 2) Penggunaan jaringan sandi (email dinas cirebonkab) belum optimal digunakan di lingkungan Kabupaten Cirebon dalam komunikasi antar perangkat daerah.
- 3) Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang belum sesuai dengan kompetensi.
- 4) Sarana dan prasarana belum memenuhi standar dalam mendukung pengelolaan persandian.

Terkait hal tersebut diatas, maka upaya-upaya agar capaian kinerja sasaran ini tetap baik atau bahkan lebih baik yaitu antara lain :

- 1) Melakukan perekrutan Tenaga Ahli disesuaikan dengan keadaan anggaran
- 2) Mengarahkan para SDM di perangkat daerah untuk mengikuti program pelatihan Pemograman melalui Digitalent Kominfo.
- 3) Penyusunan Peraturan Bupati tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) Kabupaten Cirebon serta turunannya seperti SK, SOP dan lain-lain.
- 4) Melaksanakan sosialisasi optimalisasi penggunaan email dinas mail.cirebonkab.go.id oleh ASN dan perangkat daerah.
- 5) Pelaksanaan ISO 27001:2013 Tahun 2025.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat Efisiensi (TE) pada sasaran “*Terwujudnya penyelenggaraan persandian*” diukur melalui 1 indikator yaitu **Indeks Keamanan Informas**idapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.27 Tingkat Efisiensi Sasaran 4

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Kinerja			Keuangan			TE	KATEGORI
			Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian		
1	Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Keamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi	Level II	Level II	100	96.635.500	96.625.500	99,99	0,01	Efisien

Ket : Formulasi perhitungan Tingkat Efisiensi terlampir

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa % capaian kinerja sasaran ini 100% dan % capaian keuangan sebesar 99,99% dan tingkat efisiensi 0,01. Sehingga tingkat efisiensi pada sasaran ini dikategorikan efisien.

F. Analisis Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis ke-4

Dalam mencapai sasaran strategis ke-4 ini didukung oleh 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, dengan total anggaran Rp 96.635.500,00 atau 0.55% dari anggaran total Belanja, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 96.625.500,00 dan realisasi fisik 100%, terdapat efisiensi /sisa anggaran sebesar Rp 10.000,00.

Tabel 3.28 Program dan Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis 4

No	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Realisasi Fisik	Efisiensi/ Sisa Anggaran	
		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(%)
I	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	96.635.500	96.625.500	99,99	100	10.000	0,01
1	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	96.635.500	96.625.500	99,99	100	10.000	0,01
1.1	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	96.635.500	96.625.500	99,99	100	10.000	0,01
	JUMLAH	96.635.500	96.625.500	99,99	100	10.000	0,01

Penyelenggaraan Persandian



- FGD Sertifikat Elektronik
- Pengadaan sarana keamanan informasi



3.2.5 Sasaran Strategis ke-5



Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan baik kepada perangkat daerah lain, ataupun masyarakat. Pengukuran pada sasaran ini dilakukan dengan melihat data total jumlah responden masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon . Adapun layanan yang diberikan mulai dari :

- 1. Persyaratan Pelayanan yang Diberikan Sudah Sesuai
- 2. Prosedur Pelayanan yang Diberikan Mudah
- 3. Waktu Pelayanan yang Diberikan Tepat Sesuai SOP
- 4. Produk Layanan Sesuai dengan yang Diminta
- 5. Kemampuan Petugas dalam Memberikan Pelayanan Memadai
- 6. Pelayanan yang Telah Diberikan Memuaskan
- 7. Petugas yang Memberikan Pelayanan Ramah
- 8. Produk Layanan yang Dijanjikan Diberikan Tepat Waktu
- 9. Tindak Lanjut Pengaduan/Layanan Memuaskan

Tolok ukur capaian sasaran “**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**”,diukur oleh 1 (satu) indikator yaitu **Nilai LKIP**, dengan hasil capaian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.29 Formulasi Perhitungan Sasaran 5

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKIP	$= \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$	Penilaian LHE Sakip

Sumber : Dokumen IKU Diskominfo Tahun 2025

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Hasil pengukuran atas indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika tahun 2025 pada sasaran ini menunjukkan hasil sebagai berikut

Tabel 3.30 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran 5

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Kriteria
		Target	Realisasi	% Capaian	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKIP	70,75 poin	75,70 poin	106,99	Sangat tinggi

Capaian indikator kinerja pada sasaran strategis 5 “*meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah*” dengan indikator sasaran “Nili LKIP” tahun 2025 dengan target 70,75 poin dan

teralisasi 75,70 poin sehingga tercapai sebesar 106,99%. Kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja berjalan sesuai dengan rencana.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Apabila kita membandingkan dengan tahun sebelumnya, maka dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.31 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			%Capaian		
		Tahun 2024	Tahun 2025	Capaian	Tahun 2024	Tahun 2025	Capaian %
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKIP	3,645 poin	75,70 poin	0,33	100,41	106,99	6,35

Berdasarkan tabel tersebut bahwa sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur melalui 1 indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi kinerja meningkat sebesar 0,33 poin sementara capain kinerja naik 6,35%.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Periode Tahun 2025-2029

Penjelasan perbandingan realisasi hingga Tahun 2025 dengan target akhir renstra dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.32 Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir Tahun Renstra	% Capaian
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKIP	75,70 poin	70,75 poin	106,99

Berdasarkan tabel di atas bahwa sasaran “meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” diukur melalui 1 indikator yaitu Nilai LKIP. Pada target akhir Renstra mengenai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 70,75 poin. Sementara realisasi indikator ini hingga tahun 2025 yang merupakan tahun pertama Renstra sebesar 75,70 poin maka kinerjabaru mencapai 106,99%, sehingga memenuhi target Renstra.

G. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2025 dengan Standar Nasional RPJMN Serta Capaian Organisasi/Instansi Sejenis yang Setara/Sekelas

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional/RPJMN maupun

capaian organisasi/instansi sejenis yang setara/sekelas. Hal tersebut disebabkan tidak diperolehnya data yang akurat untuk pengukuran indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian ini antara lain :

- 1) Adanya sarana dan prasarana yang mendukung dalam objek pelayanan;
- 2) Adanya komitmen dari pimpinan untuk bekerja tanggap dan akurat dengan mengedepankan pelayanan prima.

Terkait hal tersebut diatas, maka upaya-upaya agar capaian kinerja sasaran ini tetap baik atau bahkan lebih baik yaitu antara lain :

- 1) Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik dengan melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama mempertahankan penggunaan atribut pendukung petugas pelayanan;
- 2) Diperlukan upaya kemudahan pelanggan dalam mendapatkan informasi mengajukan keluhan dengan adanya operator pelayanan publik;
- 3) Perlu memberikan penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi dan terus memberi motivasi untuk mendapatkan prestasi di masa mendatang serta mempertimbangkan kesejahteraan petugas pelayanan dalam bentuk insentif khusus.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat Efisiensi (TE) pada sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon diukur melalui 1 indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.33 Tingkat Efisiensi Sasaran 5

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Kinerja			Keuangan			TE	KATEGORI
			Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian		
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKIP	70,75 poin	75,70 poin	106,99	7.068.689.308	6.299.692.205	89,12	17,87	Efisien

Ket : Formulasi perhitungan Tingkat Efisiensi terlampir

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa % capaian kinerja sasaran ini 106,99% dan % capaian keuangan sebesar 89,12% dan tingkat efisiensi 17,87. Sehingga tingkat efisiensi pada sasaran ini dikategorikan efisien.

F. Analisis Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis 5

Dalam mencapai sasaran strategis ke-6 ini didukung oleh 1 (satu) program, 6 (tujuh) kegiatan dan 19 (Sembilan belas) sub kegiatan, dengan total anggaran Rp. 7.068.689.308,00 atau 40,70% dari anggaran total Belanja, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 6.299.692.205,00 atau 89,12% dan realisasi fisik 100%, terdapat efisiensi /sisa anggaran sebesar Rp. 768.997.103,00.

Tabel 3.34 Program dan Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis 5

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Realisasi Fisik	Efisiensi/ Sisa Anggaran	
		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(%)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.068.689.308	6.299.692.205	89,12	89,12	768.997.103	10,88
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	208.527.700	195.630.265	93,82	93,82	12.897.435	6,18
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	109.257.900	107.568.801	98,45	98,45	1.689.099	1,55
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	99.269.800	88.061.464	88,71	88,71	11.208.336	11,29
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.498.584.308	4.922.828.060	89,53	89,53	575.756.248	10,47
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.361.813.208	4.815.411.506	89,81	89,81	546.401.702	10,19
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.275.000	16.275.000	100,00	100,00	-	0,00
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	120.496.100	91.141.554	75,64	75,64	29.354.546	24,36
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	53.040.000	52.950.000	99,83	99,83	90.000	0,17
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	53.040.000	52.950.000	99,83	99,83	90.000	0,17
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	315.011.100	314.354.300	99,79	99,79	656.800	0,21
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.771.000	5.771.000	100,00	100,00	-	0,00
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	147.484.000	147.373.000	99,92	99,92	111.000	0,08
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	42.546.200	42.546.200	100,00	100,00	-	0,00
4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.202.700	11.202.700	100,00	100,00	-	0,00
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.675.800	27.330.000	98,75	98,75	345.800	1,25
4.6	Penyediaan Bahan/Material	36.764.200	36.764.200	100,00	100,00	-	0,00
4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.825.000	3.825.000	100,00	100,00	-	0,00
4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.742.200	39.542.200	99,50	99,50	200.000	0,50

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Realisasi Fisik	Efisiensi/ Sisa Anggaran	
		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(%)
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	937.571.200	758.859.480	80,94	80,94	178.711.720	19,06
5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	577.571.200	401.979.480	69,60	69,60	175.591.720	30,40
5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	360.000.000	356.880.000	99,13	99,13	3.120.000	0,87
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.955.000	55.070.100	98,42	98,42	884.900	1,58
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.015.000	1.130.100	56,08	56,08	884.900	43,92
6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.400.000	26.400.000	100,00	100,00	-	0,00
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya	27.540.000	27.540.000	100,00	100,00	-	0,00
	JUMLAH	7.068.689.308	6.299.692.205	94,53	94,53	768.997.103	10,88

Berikut merupakan dokumen Nilai LKIP, sebagai berikut :



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIREBON



INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON
Alamat : Jalan Sunan Giri No. 2 Telp./Fax (0231) 321643
SUMBER

TAHUN 2025

Evaluasi AKIP 2024

4 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi)

4.c Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja

1 Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah diindaklanjuti

2 Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal

3 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja

4 Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja

5 Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal

8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Tindaklanjuti atas hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 atas implementasi SAKIP Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

NO.	REKOMENDASI	TINDAKLANJUT
1	Rekomendasi hasil evaluasi AKIP Tahun 2023 oleh APSP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sebanyak 4 rekomendasi	Rekomendasi seluruhnya telah diindaklanjuti

9. Waktu Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dilaksanakan mulai tanggal 03 s/d 17 Maret 2025

10. Gambaran Hasil Evaluasi

a. Pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon adalah 75,70 Kategori Predikat BB (Sangat Baik), namun masih terdapat kelemahan, adalah sebagai berikut :

NO.	KOMPONEN	BOBOT	NILAI
A.	PERENCANAAN KINERJA	30	24
1.	Dalam pedoman penyusunan teknis perencanaan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika namun belum tersedianya SOP Penyusunan Rencana Aksi.		
B.	PENGUKURAN KINERJA	30	22,5

11. Penutupan

a. Simpulan

Dari hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon memperoleh nilai 75,70. Nilai tersebut masuk dalam kategori BB dengan interpretasi (Sangat Baik).

b. Penutup

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan terimakasih dan apresiasi kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon atas upaya-upaya dalam mengimplementasikan SAKIP pada tahun 2024. Selanjutnya agar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon beserta seluruh jajaran agar lebih memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan SAKIP sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas kinerja serta peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

Demikian laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 atas implementasi SAKIP Tahun 2024 pada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon disusun berdasarkan Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia (SAIPI) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



INSPEKTUR
KABUPATEN CIREBON

Drs. IYAN EDIYANA, S.P., M.M., S.I., CGPAE, CORE
Pembina Utama Muda
NIP. 19661209 199312 1 002

Tembusan :
Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

Gambar 41. Hasil kegiatan berupa laporan SKM Tahun 2025

3.3 Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika mengelola anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon sejumlah **Rp. 17.363.686.848,-** dengan **realisasi Rp. 16.561.507.008,-** atau **95,38%**. Sedangkan sisa Anggaran yang tidak diserap sejumlah

Rp. 802.179.840,-. Berikut ialah rincian pengelolaan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon Pada Tahun Anggaran 2025.

Agar lebih jelas dapat disajikan pada table berikut:

Tabel 3.35 Pendapatan dan Belanja
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2025

KODE REK.	URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSEN (%)
5.	BELANJA DAERAH	17.363.686.848	16.561.507.008	95,38
5.1.	BELANJA OPERASI	16.577.693.948	15.776.978.007	95,17
5.1.01.	BELANJA PEGAWAI	5.361.813.208	4.815.411.506	89,81
5.1.02.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.215.880.740	10.961.566.501	97,73
5.2.	BELANJA MODAL	785.992.900	784.529.001	99,81
5.2.02.	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	785.992.900	784.529.001	99,81
JUMLAH BELANJA		17.363.686.848	16.561.507.008	95,38

Dalam rangka perbaikan ke depan diperlukan perencanaan yang lebih matang pada saat penyusunan anggaran sehingga dapat meminimalkan anggaran yang tidak terserap. Gambaran pencapaian sasaran strategis dengan alokasi anggaran dibandingkan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.36 Capaian Anggaran per Sasaran

No	Sasaran	Anggaran (Rp.)	Realisasi	% Capaian	Keterangan
1	Meningkatkan Kualitas Nilai Domain SPBE	6.896.872.210	5.896.872.210	85,50	Didukung oleh 1 (satu) program : Program Aplikasi Informatika
2	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	2.919.919.200	2.908.242.797	99,60	Didukung oleh 1 (satu) program : Program Informasi dan Komunikasi Publik
3	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral	360.188.800	360.074.296	99,97	Didukung oleh 1 (satu) program : Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4	Meningkatkan Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi	96.635.500	96.625.500	99,99	Didukung oleh 1 (satu) program : Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	7.68.689.308	6.299.692.205	89,12	Didukung oleh 1 (satu) program : Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota

Sumber :Simonek.go.id

Berdasarkan data tersebut diatas dapat dilihat bahwa alokasi terbesar adalah untuk mendukung sasaran kesatu yaitu “Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”, sedangkan sasaran yang paling sedikit alokasi anggarannya adalah pada sasaran keempat “Meningkatnya Pengelolaan Persadian dan Keamanan Informasi”. Sementara capaian/realisasi keuangan paling tinggi yaitu pada sasaran “Meningkatnya Pengelolaan Persadian dan Keamanan Informasi” dan capaian/realisasi paling rendah yaitu “Meningkatnya Kualitas Nilai Domain SPBE”

3.4 Inovasi

Digitalisasi di era global dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk tercapainya *good governance* menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif, Dinas Komunikasi dan Informatika telah menginisiasi inovasi tahun 2025, sebagai berikut:

No	Aplikasi	Deskripsi
1	Layanan 112 Siaga Katon 	Layanan 112 Siaga Katon merupakan layanan kegawatdaruratan yang dapat diakses secara gratis selama 24 jam oleh masyarakat Kabupaten Cirebon
2	Socakaton 	Socakaton merupakan sistem monitoring CCTV aktif mobile Kabupaten Cirebon. Portal yang diakses https://socakaton.cirebonkab.go.id

Dalam Rangka Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada program / Kegiatan di Bidang Teknologi dan Informasi, dilakukan implementasi berupa Praktek Kerja Lapangan / Program Magang bagi Mahasiswa, riset/ Penelitian dan matching fund. Implementasi tersebut berupa program Kabupaten Cirebon yang mendukung pelaksanaan Penyelenggaraan Satu Data dan Satu Peta di Kabupaten Cirebon. Penyelenggaraan Satu data, satu Peta di Kabupaten Cirebon memerlukan Kerjasama Lintas Sektoral, baik dari Organisasi Perangkat Daerah sebagai Produsen data, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai walidata serta Dunia Pendidikan yang membantu dalam penyediaan SDM melalui Magang/ Praktek Kerja Lapangan, hal ini membantu dalam menunjang kurangnya Sumber Daya Manusia khususnya Pengelola Data di Perangkat Daerah, sehingga proses pengumpulan, verifikasi serta Publikasi Data baik sectoral maupun Geospasial dapat berjalan dengan lancar.

Penghargaan

Pada Tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon menerima beberapa penghargaan dan prestasi sebagai pengakuan atas pencapaian dinas. Berikut adalah beberapa diantaranya :

No	Penghargaan/Lintas Sektor
1	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tingkat Jawa Barat Tahun 2025 dengan predikat INFORMATIF 



BAB IV berisi :

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Langkah Perbaikan Kinerja

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun Anggaran 2025 merupakan Tahun ke-1 (lima) dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Hasil laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Dari analisis 5 (lima) sasaran, yaitu
 - a) Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya Kualitas Nilai Domain SPBE” dengan indikator sasaran “Indeks Domain Tata Kelola” sebesar 119,04% atau termasuk kategori sangat tinggi, yang didukung oleh 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan dengan tingkat efisiensi 9,47 sehingga dapat dikatakan efisien.
 - b) Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya keterbukaan informasi publik” dengan indikator sasaran “Indeks Keterbukaan Informasi Publik” sebesar 120% atau termasuk kategori sangat tinggi, yang didukung oleh 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan dengan tingkat efisiensi 0,81 atau dapat dikatakan efisien.
 - c) Capaian sasaran strategis 3 “Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral” dengan indikator sasaran “Indeks Pembangunan Statistik (IPS)” sebesar 100% atau termasuk kategori sangat tinggi, yang didukung oleh 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan tingkat efisiensi 0,0 atau dapat dikatakan efisien.
 - d) Capaian sasaran strategis 4 “Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi” dengan indikator sasaran “Indeks Keamanan Informasi (KAMI)” sebesar 100% atau termasuk kategori sangat tinggi, dengan didukung oleh 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan tingkat efisiensi 0,01 atau dapat dikatakan efisien.
 - e) Capaian sasaran strategis 5 “Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah” dengan indikator sasaran “Nilai LKIP” sebesar 89,12% atau termasuk kategori sangat tinggi, dengan didukung oleh 1 (satu) program, 6 (enam) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan dengan tingkat efisiensi 17,87 atau dapat dikatakan efisien
- 2) Realisasi anggaran pada tahun 2025 adalah Rp. 16.561.507.0008,00 dengan presentase 95,38% dari keseluruhan anggaran Belanja sebesar Rp. 17.363.686.847,00, dan efisiensi anggaran belanja sebesar Rp. 802.179.840,00 atau sebesar 4,62%

4.2. Langkah Perbaikan Kinerja

Guna meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon di masa mendatang, diperlukan strategi-strategi terukur, antara lain :

- 1) Melakukan perbaikan perencanaan dengan membuat pemetaan dalam rangka penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan dalam upaya menyelaraskan target sasaran yang telah ditetapkan dengan regulasi yang ada.
- 2) Melakukan kerjasama dengan penyelenggara pelatihan yaitu BKPSDM dan lembaga pelatihan swasta, khususnya untuk pelatihan teknis teknologi informasi, statistik, persandian, perencanaan dan kepegawaian.
- 3) Aspek perencanaan strategis SPBE, aspek teknologi informasi dan komunikasi dan aspek penyelenggara SPBE harus direviu, dievaluasi dan diperbaiki secara berkala dan terus menerus. Melalui proses reviu dan evaluasi serta perbaikan secara terus menerus, diharapkan untuk tahun berikutnya dapat mencapai nilai indeks Domain Tata Kelola SPBE sesuai dengan target yang ditentukan.
- 4) Aspek perencanaan strategis SPBE dapat ditingkatkan dengan melibatkan Diskominfo dalam rencana anggaran SPBE, melibatkan semua perangkat daerah dalam penyusunan dokumen inovasi proses bisnis SPBE dan menyusun dokumen terkait proses pembangunan aplikasi SPBE.
- 5) Aspek teknologi informasi dan komunikasi dapat ditingkatkan dengan mengintegrasikan atas layanan pusat data dengan layanan pusat data nasional atau pusat data daerah lainnya, dan mengintegrasikan jaringan intra dengan jaringan intra instansi pusat/pemerintah daerah lainnya.
- 6) Aspek penyelenggara SPBE dapat ditingkatkan dengan melakukan *reviu* fungsi Tim Koordinasi SPBE yang telah ada dengan program kerja yang terencana yang ada pada Peta rencana SPBE.
- 7) Penyelarasan strategi media, mengidentifikasi tren kelemahan dan potensi perbaikan dalam penggunaan setiap jenis media, peningkatan konten, pemanfaatan teknologi, optimasi platform online, peningkatan kemitraan media dan melibatkan partisipasi masyarakat agar keterbukaan informasi publik dapat meningkat.
- 8) Mendorong peningkatan *single data* dan *big datacentre* yang terintegrasi, sehingga akan mempercepat dalam analisis terhadap berita dan opini, audit serta pengukuran indeks kepuasan, indeks pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang nantinya dikompilasi dalam sebuah direktori data internal agar bisa dipergunakan sebagai bahan sosialisasi namun tetap meningkatkan koordinasi validitas data dengan instansi atau perangkat daerah terkait.
- 9) Melakukan kerjasama dengan stakeholder dalam membangun dan mengembangkan tata kelola data statistik sektoral
- 10) Mengarahkan para SDM di perangkat daerah untuk mengikuti program pelatihan Pemograman melalui Digita Telnt Kominfo.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Cirebon.

Sumber, Februari 2026

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIREBON**



BAMBANG SUDARYANTO, SH., MH

Pembina Tk. I

NIP. 19781024 200604 1 015

LAMPIRAN

- Lampiran 1. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- Lampiran 3. Catatan Hasil Reviu atas LKIP Tahun 204
- Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKIP Tahun 2024
- Lampiran 5. IKU 1 - Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025
- Lampiran 6. IKU 2 - Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025
- Lampiran 7. IKU 3 - Hasil Pengolahan dan Analisis Data Statistik Sektorial Tahun 2025
- Lampiran 8. IKU 4 - Hasil Penilaian Mandiri Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Tahun 2025
- Lampiran 9. IKU 5 –Hasil Penilaian LKIP Tahun 2024
- Lampiran 10. Formulasi Tingkat Efisiensi
- Lampiran 11. Perbandingan Capaian LKIP Kementrian Komunikasi Dan Informatika RI Dan Diskominfo Kabupaten Cirebon Tahun 2025
- Lampiran 12. Surat Pernyataan Telah Direviu
- Lampiran 13. Laporan Hasil Evaluasi LKIP Tahun 2024

Lampiran 1. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

	PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jln. Sunan Drajat No.15 Telp. (0231) 8330580 Sumber	Nomor SOP	050/1148/Sekret
		Tanggal Pembuatan	03 November 2017
		Tanggal Revisi (ditinjau kembali)	
		Tanggal Efektif	
		Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon  SUGENG DARSONO, SH., MM NIP. 19620718 198603 1 003
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan/ Sekretariat		Nama SOP	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Revisi atas Laporan Kinerja 6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon 7. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon		- Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). - Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja SKPD.	

Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
- SOP Alur surat masuk dan surat keluar - SOP Pencarian Data dan Informasi - SOP Perjanjian Kinerja - SOP pengadaan barang dan jasa - SOP Pengarsipan	- Renstra SKPD - Format penyusunan LAKIP - Dokumen Penetapan Kinerja - Format Pengukuran Kinerja - Data dan Informasi Capaian Kinerja SKPD - Laporan Realisasi Keuangan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
LAKIP sebagai dokumen pertanggungjawaban atas kinerja SKPD. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan LAKIP ini tidak akan berjalan lancar.	Indikator kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian kinerja

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu baku			Ket
		Sekdis	Kasubag PEP	Arsiparis	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memerintahkan penyusunan LAKIP DISKOMINFO					Disposisi Surat	20 menit	Disposisi surat	
2.	Membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing - masing bidang dan sekretariat					Format penyusunan LAKIP DISKOMINFO	1 hari	Format penyusunan LAKIP DISKOMINFO	
3.	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi kinerja kepada masing-masing bidang dan sekretariat					Format penyusunan LAKIP DISKOMINFO	2 jam	Format penyusunan LAKIP DISKOMINFO	
4.	Menghimpun format data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat					Format penyusunan LAKIP DISKOMINFO	1 jam	Format penyusunan LAKIP DISKOMINFO	
5.	Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul					Format penyusunan LAKIP DISKOMINFO	1 hari	Draft LAKIP DISKOMINFO	
6.	Membuat dokumen LAKIP DISKOMINFO	Ya				Draft LAKIP DISKOMINFO	1 minggu	Dokumen LAKIP DISKOMINFO	
7.	Mengoreksi Dokumen LAKIP DISKOMINFO		Tidak			Dokumen LAKIP DISKOMINFO	1 hari	Dokumen LAKIP DISKOMINFO	
8.	Menyampaikan Dokumen LAKIP kepada Kadis untuk memintakan persetujuan					Dokumen LAKIP DISKOMINFO	3 jam	Dokumen LAKIP	
9.	Penandatanganan dokumen LAKIP DISKOMINFO oleh Kepala Dinas					Dokumen LAKIP DISKOMINFO	10 menit	Disposisi persetujuan dokumen LAKIP	
10.	Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat					Konsep surat pengantar	20 menit	Surat Pengantar	
11.	Penggandaan Dokumen LAKIP					Dokumen LAKIP DISKOMINFO	30 menit	Dokumen LAKIP DISKOMINFO	
12.	Pengiriman dokumen LAKIP DISKOMINFO ke BAPPELITBANGDA dan pengarsipan					Dokumen LAKIP DISKOMINFO	15 menit	Dokumen LAKIP DISKOMINFO	



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAMBANG SUDARYANTO, S.H., M.H..
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Drs. H. IMRON, M.Ag
Jabatan : Bupati Cirebon

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Februari 2025

↳ Pihak Kesatu,


 Pihak Kedua,


 Drs. H. IMRON, M.Ag

BAMBANG SUDARYANTO, S.H., M.H.,
Pembina Tk.I
NIP. 19781024 200604 1 015

Perkin : 2.10.01-Eselon II.b
sinonek.cirebonkab.go.id



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	Rumus	Tipe	Target	(7)	(8)
1.1.	Meningkatkan Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik:	Indeks SPBE	Rata-rata nilai tertinggi dari tingkat kematangan setiap indikator SPBE	Non Kumulatif	Meningkat	Hasil Evaluasi Kematangan RB/ Self assessment	3,25 Poin
1.1.01.	Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Domain Layanan SPBE	Rata-rata nilai tertinggi dari tingkat kematangan domain layanan SPBE	Non Kumulatif	Meningkat	Hasil Evaluasi Kematangan RB/ Self assessment	3,05 Poin
1.1.02.	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Rata-rata nilai tertinggi dari sub indikator keterbukaan informasi publik	Non Kumulatif	Meningkat	Hasil Evaluasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat	75 Poin
1.1.03.	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	jumlah data sektoral yang telah dimutakhirkan/jumlah total data sektoral yang harus disediakan x 100%	Non Kumulatif	Meningkat	Hasil evaluasi pada gendata.cirebonkab.go.id dan aplikasi satu data	80 Persen
1.1.04.	Meningkatnya pengelolaan persandian dan keamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi (IKAMI)	jumlah angka tertinggi dari tingkat kematangan setiap area keamanan informasi	Non Kumulatif	Meningkat	Hasil Evaluasi dari BSSN / Self assessment	2 Level
1.2.	Meningkatnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP = aspek perencanaan kinerja (30 %) + aspek pengukuran kinerja (30 %) + pelaporan kinerja (15 %) + evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25 %)	Kumulatif	Meningkat	Hasil Evaluasi/penilaian dari Kementerian RB	68,5 Nilai
1.2.01.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai LKIP	Nilai LKIP = aspek perencanaan kinerja (30 %) + aspek pengukuran kinerja (30 %) + pelaporan kinerja (15 %) + evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25 %)	Non Kumulatif	Meningkat	Hasil Evaluasi Kemer PAN RB/ Kementerian Kabupaten Cirebon	70,75 Nilai

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.01.03.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	6.436.590.140,00	Sumber Dana: DAU
1.1.02.02.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.683.979.200,00	Sumber Dana: DAU, DAU, DBH
1.1.03.02.	PROGRAM PENYELANGKARAN STATISTIK SEKTORAL	329.467.900,00	Sumber Dana: DAU
1.1.04.02.	PROGRAM PENYELANGKARAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI)	119.725.900,00	Sumber Dana: DAU
1.2.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.514.712.308,00	Sumber Dana: DAU, DAU, PAD, DBH, Pajak BJT
J U M L A H		16.084.475.448,00	

Lampiran Perkin : 2.10.01.-Eselon II.b
sinonek.ci.rebengkab.go.id

Hal. 1 / 2

Pihak Kedua
Bupati Cirebon,


Drs. H. IMRON, M.Ag

Sumber, Februari 2025
Pinak Kesatu
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, *B*
Bambang
BAMBANG SUDARYANTO, S.H., M.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19781024 200604 1 015

Lampiran Perkin : 2.10.01-Eselon II.b
sinonek.ci.rebonkab.go.id

Hal. 2 / 2



Lampiran 3. Catatan Hasil Reviu atas LKIP Tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

INSPEKTORAT

Jl. Sunan Giri No. 2 Telp/Fax. (0231) 321643

Website : inspektorat.cirebonkab.go.id email inspektorat@cirebonkab.go.id

SUMBER

CATATAN HASIL EVALUASI

ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2024

PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIREBON

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.11.1/355/Sekrt tanggal 21 Februari 2025 untuk melaksanakan Evaluasi AKIP Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, dengan ini kami sampaikan Catatan Hasil Evaluasi sebagai berikut :

1. Waktu Pelaksanaan Evaluasi:

Evaluasi dilaksanakan mulai dari tanggal 03 s/d 17 Maret 2025.

2. Penilaian

Dari hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon diperoleh hasil, sebagai berikut :

Nama Perangkat Daerah

:

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

Nilai Angka Evaluasi AKIP

:

75.70

Kategori Predikat

:

BB (Sangat Baik)

Dengan Catatan sebagai berikut

:

a. Pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

NO.	KOMPONEN	BOBOT	NILAI
A.	PERENCANAAN KINERJA	30	24
1.	Dalam pedoman penyusunan teknis perencanaan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika namun belum tersedianya SOP Penyusunan Rencana Aksi.		
B.	PENGUKURAN KINERJA	30	22.5
2.	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang namun belum tersedianya Dokumen laporan tim kerja.		
C.	PELAPORAN KINERJA	15	11.7
3.	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi namun belum didukung dengan Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).		
D.	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25	17.5

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon



BAMBANG SUDARYANTO,S.H. M.H

NIP. 19781024 200604 1 015

Wakil Penanggung Jawab



EUIS SITI SONDARI, S.Sos

NIP. 19690206 198903 2 005

4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai namun belum tersedianya Bukti dukung keterlibatan Tim SPI dalam evaluasi kinerja internal.		
JUMLAH	100	75.7

b. Tindaklanjut Hasil Evaluasi Sebelumnya

Nº	REKOMENDASI	TINDAKLANJUT
1	Rekomendasi hasil evaluasi AKIP Tahun 2023 oleh APIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sebanyak 4 rekomendasi	Rekomendasi seluruhnya telah ditindaklanjuti

3. Rekomendasi

a. Dari hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 sebagaimana tercantum di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, agar :

NO.	KOMPONEN
A.	PERENCANAAN KINERJA
1.	Menyusun SOP Penyusunan Rencana Aksi dan ditanda tangani
B.	PENGUKURAN KINERJA
2.	Menyusun Dokumen laporan tim kerja dan ditanda tangani
C.	PELAPORAN KINERJA
3.	Bukti dukung Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan ditanda tangani
D.	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL
4.	Bukti dukung keterlibatan Tim SPI dalam evaluasi kinerja internal dan ditanda tangani

b. Tindaklanjut Hasil Evaluasi Sebelumnya

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon telah menyelesaikan tindaklanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun 2024

4. Komentar Pejabat yang Dievaluasi :

Demikian Catatan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, kiranya menjadi maklum dan sebagai bahan untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dimaksud.

Sumber, Maret 2025

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKIP Tahun 2024 dan Berita Acara TL LHE AKIP 2024

NO	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
A.	PERENCANAAN KINERJA	
1.	Dalam pedoman penyusunan teknis perencanaan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika namun belum tersedianya SOP Penyusunan Rencana Aksi	SUDAH DITINDAK LANJUTI
B.	PENGUKURAN KINERJA	
2.	Setiap Level organisasi melakukan pemantuan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang namun belum tersedianya dokumen laporan tim kerja	SUDAH DITINDAK LANJUTI
NO	URAIAN HASIL EVALUASI	
C.	PELAPORAN KINERJA	
3.	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organissasi namun belum didukung dengan Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	SUDAH DITINDAK LANJUTI
D.	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai namun belum tersedianya Bukti Dukung keterlibatan Tim SPI dalam evaluasi kinerja internal	SUDAH DITINDAK LANJUTI



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

INSPEKTORAT

Jl. Sunan Giri No. 2 Telp/Fax. (0231) 321643

Website : inspektoral@cirebonkab.go.id e-mail : inspektoral@cirebonkab.go.id

SUMBER45611

BERITA ACARA

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh satu bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh lima, bertempat di Sumber, yang bertandatangan di bawah ini Ketua Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektoral Kabupaten Cirebon :

Nama : SRI SUMARTINI, S.K.M., M.K.M.
NIP : 19741105 200003 2 005

Telah melakukan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Inspektoral Kabupaten Cirebon Tahun 2025 berdasarkan LHE nomor : 700.1.2.1/500-Sekr, tanggal 17 Maret 2025 atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, dengan hasil sebagai berikut:

No.	Tahun Evaluasi	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Keterangan
				S	DP	B	
1.	2025 (TA 2024)	4	4	4			
JUMLAH		4	4	4			S : 100 % DP : % B : %

Demikian Berita Acara ini dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap dan untuk dipergunakan seperlunya.

Penanggungjawab TLHP
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon
Perencana Ahli Muda,



AHMAD SAMSDIN, S.Sos.
NIP. 19810414 200801 1 004

Tim TLHP
Inspektoral Kabupaten Cirebon
Ketua,



SRI SUMARTINI, S.K.M., M.K.M.
NIP. 19741105 200003 2 005

Mengetahui,
Tim Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024
pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
Ketua,



ARIAN CAHYA PRAMADI, S.E.
NIP. 19790419 201001 1 007

MATRIS

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON

Tahun Pemeriksaan : 2025
Nomor & Tanggal LHP : 700.1.2.1/500-Sekr, Tanggal 17 Maret 2025
Pemeriksaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

ASPEK	ENTITAS / UNIT KERJA	NO	TENDAN	REKOMENDASI		Jumlah	Nilai (Rp)	TINDAK LANJUT DAN ENTITAS	TINDAK LANJUT				KETERANGAN
				Rekomendasi	Rekomendasi				Selesai	Belum Selesai	Selanjutnya		
									Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)	
Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Cirebon		1	Catatan pedoman penyusunan teknis perencanaan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika namun belum tersedianya SOP Penyusunan Rencana Aksi	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon agar menyusun SOP Penyusunan Rencana Aksi dan ditandatangani	1	-	SOP Penyusunan Rencana Aksi, yang sudah ditandatangani Kepala Dinas	1	-	-	0	-	
		2	Salah satu indikator mengukur kemampuan atau pencapaian capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang namun belum tersedianya Dokumen Laporan Tim Kerja	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon agar menyusun Dokumen Laporan Tim Kerja dan ditandatangani	1	-	Laporan Hasil Evaluasi LKIP Tahun 2024 yang sudah ditandatangani oleh Ketua Tim Kerja	1	-	-	0	-	
		3	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organissasi namun belum didukung dengan Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon agar melakukan Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Cirebon (SKM) dan ditandatangani	1	-	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 ditandatangani dengan bukti dukung	1	-	-	0	-	
		4	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai namun belum tersedianya Bukti dukung keterlibatan Tim SPI dalam evaluasi kinerja internal	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon agar melakukan Bukti dukung keterlibatan Tim SPI dalam evaluasi kinerja internal dan ditandatangani	1	-	Kepuasan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Nomor 003.0.1/500-Sekr/2025 tentang Pelaksanaan Tugas Penyelenggaraan SPI Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	1	-	-	0	-	
Jumlah			4	-	4	-	4	-	0	-	0	-	0

Penanggungjawab TLHP
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
Perencana Ahli Muda


AHMAD SAMSDIN, S.Sos.
NIP. 19810414 200801 1 004

Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
Inspektoral Kabupaten Cirebon
Ketua


SRI SUMARTINI, S.K.M., M.K.M.
NIP. 19741105 200003 2 005

Sumber : 21 Mei 2025
PIC


ARIAN CAHYA PRAMADI, S.E.
NIP. 19790419 201001 1 007

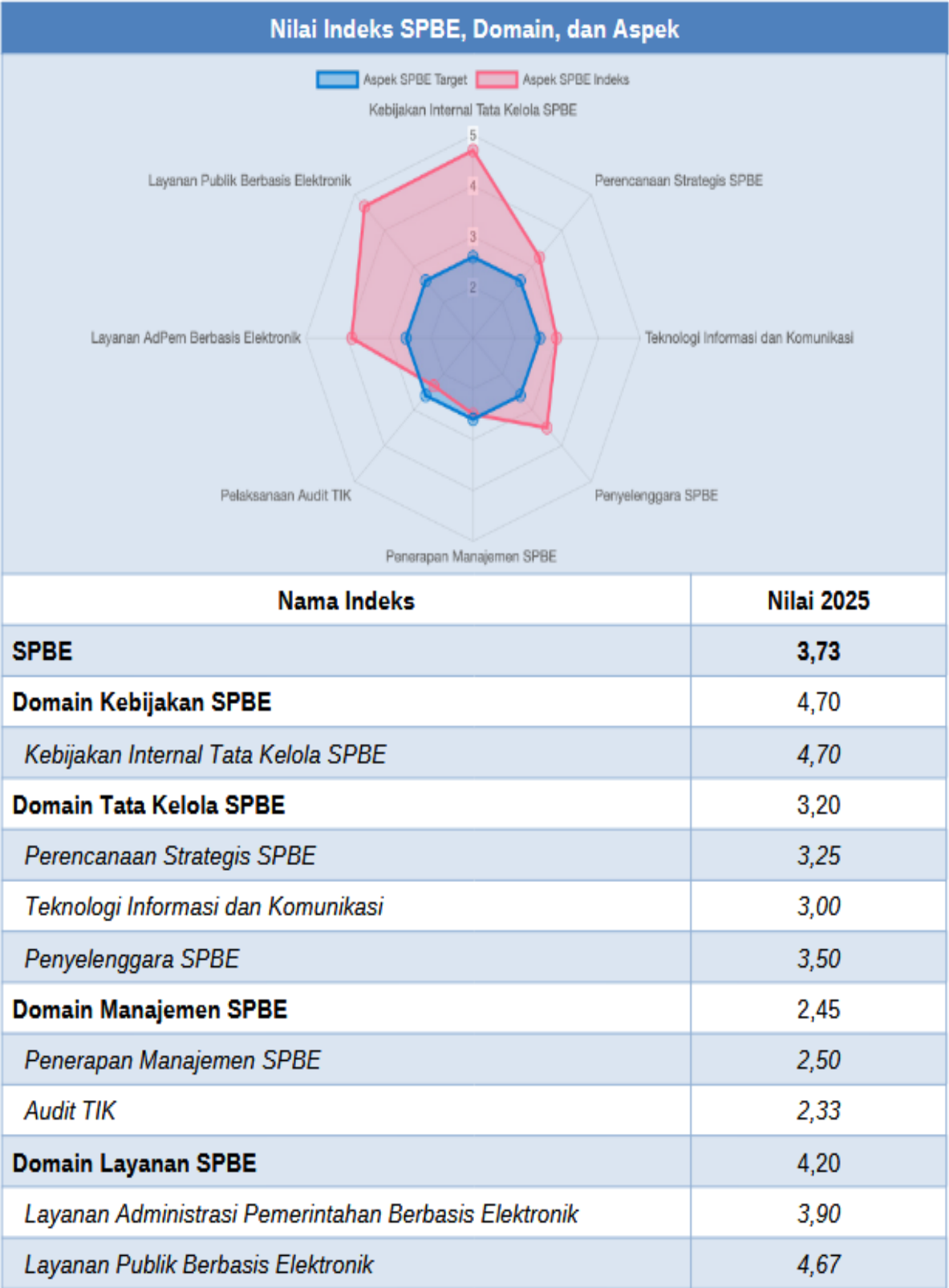


LKIP DISKOMINFO TAHUN 2025

69

INDEKS SPBE – PEMERINTAH KAB. CIREBON

3,73
(Sangat Baik)



Lampiran 6. IKU 2 - Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025



KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN
KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 006/SK/KI-JBR/XI/2025

TENTANG
HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang

a. bahwa guna mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik;

b. bahwa Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah selesai dilaksanakan dan dihasilkan kualifikasi yang menjadi tolak ukur pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2025.

Mengingat

a. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

b. Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;

e. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Seri E).

Sekretariat: Jalan Turangga No 25 Bandung-40263 | Telp/faks: (022) 735 116 56 | email: kipjabar@jabarprov.go.id / kipjabar@gmail.com

Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
Nomor : 006/SK/KI-JBR/XI/2025
Tentang : Hasil Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2025

HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2025

1. PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KATEGORI
1	Pemerintah Kabupaten Karawang	100	INFORMATIF
2	Pemerintah Kabupaten Sumedang	100	INFORMATIF
3	Pemerintah Kabupaten Bandung	99,2	INFORMATIF
4	Pemerintah Kota Bekasi	98,6	INFORMATIF
5	Pemerintah Kota Bandung	98,5	INFORMATIF
6	Pemerintah Kota Depok	98,42	INFORMATIF
7	Pemerintah Kota Bogor	97,3	INFORMATIF
8	Pemerintah Kota Cimahi	96,86	INFORMATIF
9	Pemerintah Kota Banjar	94,96	INFORMATIF
10	Pemerintah Kabupaten Pangandaran	93,88	INFORMATIF
11	Pemerintah Kabupaten Purwakarta	91,6	INFORMATIF
12	Pemerintah Kota Cirebon	91,4	INFORMATIF
13	Pemerintah Kabupaten Kuningan	91	INFORMATIF
14	Pemerintah Kabupaten Bekasi	90,24	INFORMATIF
15	Pemerintah Kabupaten Ciamis	90,12	INFORMATIF
16	Pemerintah Kota Sukabumi	90,04	INFORMATIF
17	Pemerintah Kabupaten Subang	90	INFORMATIF

f. Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 004/KEP/KI-JBR/V/2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Pada Badan Publik di Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tanggal 25 November 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT TENTANG HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada Badan Publik tahun 2025, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip terukur, obyektif, akuntabel, partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.

KEDUA : Hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik sebagaimana pada Diktum KESATU terdiri dari 5 kategori Badan Publik yang telah dikualifikasikan berdasarkan tolak ukur yang dihasilkan dari setiap tahapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Komisi ini.

KETIGA : Keputusan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik merupakan kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan tidak dapat diganggu gugat.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 25 November 2025
Ketua
Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Husein Farhani Mubarak, S.H., M.Si.

Sekretariat: Jalan Turangga No 25 Bandung-40263 | Telp/faks: (022) 735 116 56 | email: kipjabar@jabarprov.go.id / kipjabar@gmail.com

18	Pemerintah Kabupaten Majalengka	90	INFORMATIF
19	Pemerintah Kabupaten Cirebon	90	INFORMATIF
20	Pemerintah Kota Tasikmalaya	78	CUKUP INFORMATIF
21	Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya	71,8	CUKUP INFORMATIF
22	Pemerintah Kabupaten Bandung Barat	71,08	CUKUP INFORMATIF
23	Pemerintah Kabupaten Garut	70,48	CUKUP INFORMATIF
24	Pemerintah Kabupaten Bogor	69,32	CUKUP INFORMATIF
25	Pemerintah Kabupaten Cianjur	67,96	CUKUP INFORMATIF
26	Pemerintah Kabupaten Indramayu	67,32	CUKUP INFORMATIF
27	Pemerintah Kabupaten Sukabumi	42,68	KURANG INFORMATIF

Sekretariat: Jalan Turangga No 25 Bandung-40263 | Telp/faks: (022) 735 116 56 | email: kipjabar@jabarprov.go.id / kipjabar@gmail.com

Lampiran 7. IKU 3 - Hasil Pengolahan dan Analisis Data Statistik Sektoral Tahun 2025

- Perhitungan dari capaian sasaran ini terdiri dari 2 (dua) komponen penunjang yaitu:
 - 1) Persentase dokumen statistik yang dihasilkan, dengan target 90% dari target akhir Renstra
 - 2) Persentase keterisian data yang dikelola, dengan target 90% pada tahun 2025.

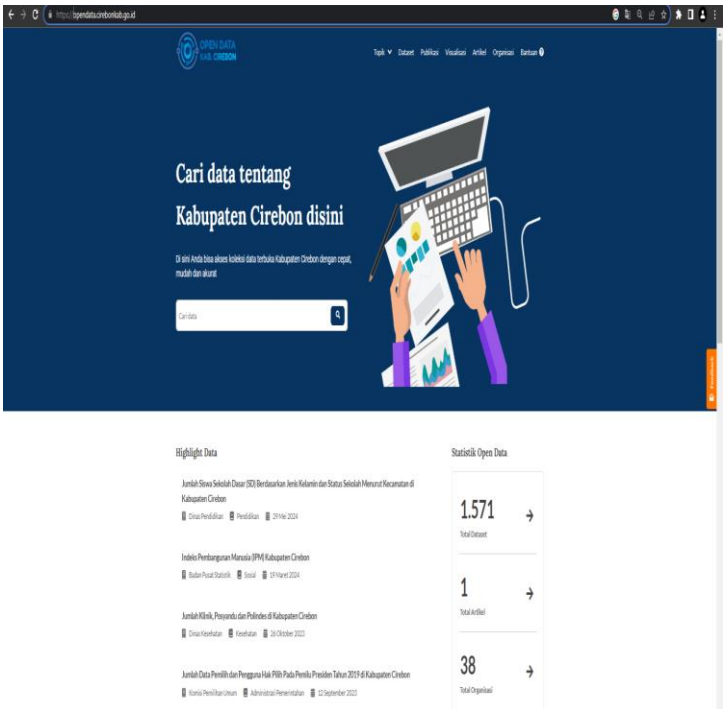
Dan rumus perhitungannya sebagai berikut:

$$= \frac{(\% \text{ dokumen yang dihasilkan} + \% \text{ keterisian data pada opendata})}{\text{Total Komponen}} \times 100\%$$

- Capaian dari komponen sasaran ini sebagai berikut :
 - 1) Capaian presentase dokumen statistik yang dihasilkan adalah 100%, dengan telah disusunnya buku statistik daerah
 - 2) Capaian presentase keterisian data yang dikelola adalah 90%, dengan telah terisinya data 1.571 data dari total 1.571 data.

Dengan demikian, kita dapat melakukan pengukuran dalam pencapaian sasaran kinerja ini:

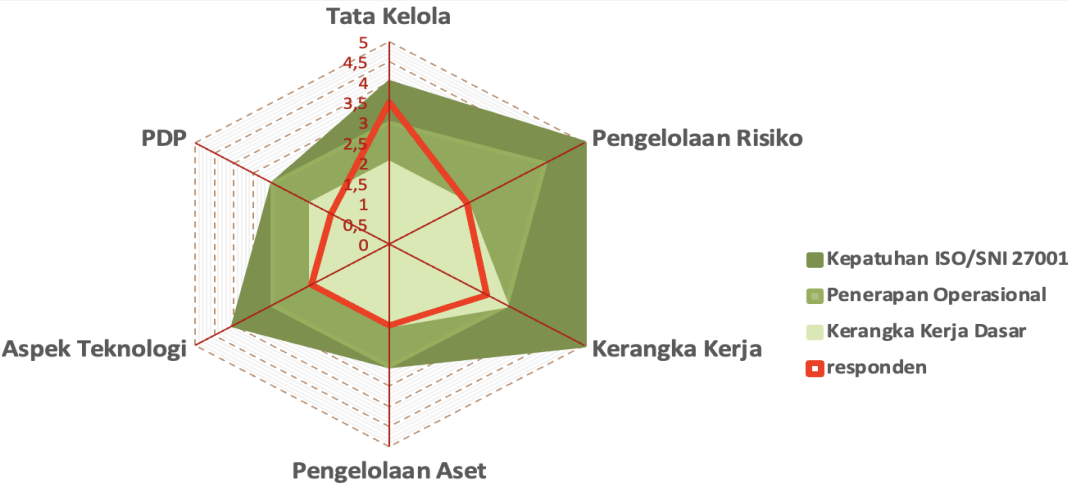
$$\begin{aligned} &= \frac{(\% \text{ dokumen yang dihasilkan} + \% \text{ keterisian data pada opendata})}{\text{Total Komponen}} \times 100 \\ &= \frac{(90\% + 90\%)}{2} \\ &= \frac{(180\%)}{2} \\ &= 90\% \end{aligned}$$



Lampiran 8. IKU 4 - Hasil Penilaian Mandiri Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Tahun 2025

Indeks KAMI (Keamanan Informasi) Versi 5.0

Responden: Satuan Kerja Direktorat Departemen Alamat 1 Alamat 2 Kota Kode Pos (Kode Area) Nomor Telpn user@departemen_responden.go.id HH/BB/TTTT	Skor Kategori SE : 31 Kategori SE Tinggi		
	Hasil Evaluasi Akhir:		
	Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar		
	123456/89#####		
Tingkat Kelengkapan Penerapan Standar ISO27001 sesuai		543	
Tata Kelola : 103		T. Kematangan III+	
Pengelolaan Risiko : 36		T. Kematangan II	
Kerangka Kerja Keamanan Informas : 147		T. Kematangan II+	
Pengelolaan Aset : 117		T. Kematangan II	
Teknologi dan Keamanan Informasi : 108		T. Kematangan II	
Pelindungan Data Pribadi : 32		T. Kematangan I+	
Pengamanan Keterlibatan P.Ketiga : 0 %			



Lampiran 9. IKU 5 – Nilai LKIP Tahun 2024



**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIREBON**



INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON
Alamat : Jalan Sunan Giri No. 2 Telp./Fax (0231) 321643
SUMBER
TAHUN 2025

Evaluasi AKIP 2024

4 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Apikasi).

4.c Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja

1 Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.

2 Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.

3 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

4 Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

5 Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Tindaklanjuti atas hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 atas implementasi SAKIP Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

NO.	REKOMENDASI	TINDAKLANJUT
	Rekomendasi hasil evaluasi AKIP Tahun 2023 oleh APIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sebanyak 4 rekomendasi	Rekomendasi seluruhnya telah ditindaklanjuti

9. Waktu Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dilaksanakan mulai tanggal 03 s/d 17 Maret 2025.

10. Gambaran Hasil Evaluasi

a. Pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon adalah 75,70 Kategori Predikat BB (Sangat Baik), namun masih terdapat kelemahan, adalah sebagai berikut :

NO.	KOMPONEN	BOBOT	NILAI
A.	PERENCANAAN KINERJA	30	24
	1. Dalam pedoman penyusunan teknis perencanaan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika namun belum tersedianya SOP Penyusunan Rencana Aksi.		
B.	PENGUKURAN KINERJA	30	22,5

Evaluasi AKIP 2024

Page 9

Lampiran 10. Formulasi Tingkat Efisiensi

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut.

$$IE = \frac{\%CAPAIAN\ OUTPUT}{\%CAPAIAN\ INPUT}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\%RENCANA\ CAPAIAN\ OUTPUT}{\%RENCANA\ CAPAIAN\ INPUT}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Efisiensi ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Apabila $IE \geq SE$: Kegiatan Efisien
Apabila $IE < SE$: Kegiatan Tidak Efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Lampiran 11. Capaian Kinerja Diskominfo Kabupaten Cirebon Tahun 2025

CAPAIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025		%Capaian	Kriteria/ Kode
			Target Akhir	Realisasi		
1	Meningkatkan Kualitas Nilai Domain SPBE	<u>Indikator:</u> Indeks Domain Tata Kelola Indeks Domain Layanan SPBE Indeks Domain Manajemen SPBE <u>Meta Indikator :</u> Nilai domain tata kelola SPBE yang dikeluarkan Kemenpan RB	3.15 poin	3.73 poin	119.04	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	<u>Indikator:</u> Indeks Keterbukaan Informasi Publik <u>Meta Indikator :</u> Nilai keterbukaan informasi publik yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat	75 poin	90 poin	120	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral	<u>Indikator:</u> Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral <u>Meta Indikator :</u> Hasil pengolahan data mandiri yang terdiri dari capaian dokumen yang telah disusun dan capaian keterisian data statistic sektoral	80%	90,4%	113	Sangat Tinggi
4	Meningkatkan Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi	<u>Indikator:</u> Indeks Keamanan Informasi <u>Meta Indikator :</u> Nilai hasil penilaian mandiri terkait Tingkat kesiapan keamanan informasi	Level 2	Level 2	100	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	<u>Indikator:</u> Nilai LKIP <u>Meta Indikator :</u> Hasil survei kepuasan aparatur terkait layanan	70,75 Nilai	75,70 Nilai	106,99	Sangat Tinggi



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIREBON**

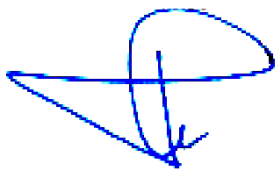
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai pedoman laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.

Sumber, Februari 2026

Ketua Tim Reviu



FAJAR SUTRISNO, S.Si
NIP. 19750903 200112 1 004

Lampiran 13. Laporan Hasil Evaluasi LKIP Tahun 2024



LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2024 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIREBON



INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON
Alamat : Jalan Sunan Giri No. 2 Telp./Fax (0231) 321643
SUMBER
TAHUN 2025

Evaluasi AKIP 2024



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

INSPEKTORAT

Jalan Sunan Giri No. 2 Telp./Fax (0231) 321643
Website: inspektorat.cirebonkab.go.id
email: inspektorat@cirebonkab.go.id, inspektorat_kabcirebon@yahoo.co.id

SUMBER 45611

Sumber, 17 Maret 2025

Nomor : 700.1.2.1/500-Sekrt
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

Kepada :
Yth. Bupati Cirebon
di-
Sumber

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, sebagai berikut :

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- f. Keputusan Inspektur Nomor 700/Kep. 247 - Sekrt/2023 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Cirebon
- g. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Cirebon Nomor : 800.1.11.1/355/sEKRT tanggal 21 Pebruari 2025 untuk melaksanakan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

Evaluasi AKIP 2024

Page 1

2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi AKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi AKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Kabupaten Cirebon.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Pelaksanaan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Perangkat Daerah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
- b. Pelaksanaan evaluasi Kinerja AKIP secara khusus bertujuan untuk :
 - 1) Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
 - 2) Menilai tingkat implementasi SAKIP
 - 3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
 - 4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
 - 5) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Evaluasi AKIP 2024

Page 2

4. Ruang Lingkup

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- e. Memonitor tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

5. Metodologi dan Teknik Evaluasi

- a. Dalam pelaksanaan AKIP ini, menggunakan metodologi sebagai berikut :
 - 1) Pengumpulan data dan informasi
 - 2) Wawancara
 - 3) Konfirmasi
 - 4) Studi Dokumentasi
- b. Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIP, dan setiap sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat, dengan kategori predikat sebagai berikut :

NO.	PREDIKAT	NILAI ANGKA	INTERPRETASI PREDIKAT
1.	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja

Evaluasi AKIP 2024

Page 3



LKIP DISKOMINFO TAHUN 2025

78

NO.	PREDIKAT	NILAI ANGKA	INTERPRETASI PREDIKAT
			telah dilakukan sampai ke level individu.
2.	A	> 80 – 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/ Subkoordinator.
3.	BB	> 70 – 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sam ai ke level eselon 3/koordinator.
4.	B	> 60 – 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1 / 3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
5.	CC	> 50 – 60	Cukup (memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6.	C	> 30 – 50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi 4system manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7.	D	0 – 30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya

Evaluasi AKIP 2024

Page 4

3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.
4	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.
5	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyaluran (cascading) disertai level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.
6	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.
5	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.
8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
10	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.
11	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.
4	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.
6	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.
7	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
8	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
2	PENGUKURAN KINERJA
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.

Evaluasi AKIP 2024

Page 6

NO.	PREDIKAT	NILAI ANGKA	INTERPRETASI PREDIKAT
			sangat mendasar, khususnya dalam im lementasi SAKIP.

6. Gambaran Umum Perangkat daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 143 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistic dan bidang persandian;
- Pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- Pengelolaan aplikasi informatika;
- Pengelolaan statistic sektoral;
- Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
- Pelaksanaan dan pelaporan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian;
- Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

- Kepala
- Sekretaris terdiri dari:
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - Subbagian Keuangan dan Aset
- Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
- Bidang Teknologi dan Informatika
- Bidang Statistik, Persandian dan E-Government, terdiri dari:
 - Seksi Statistik
 - Seksi Aplikasi Keamanan dan Persandian
- Unit Pelaksana Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

7. Gambaran Umum Implementasi AKIP Perangkat Daerah.

Implementasi AKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, sebagai berikut :

1	PERENCANAAN KINERJA
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia
1	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.

Evaluasi AKIP 2024

Page 5

2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan
1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.
5	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.
6	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
7	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.
7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.
8	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.
9	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
3	PELAPORAN KINERJA
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.
4	Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.
5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.
6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.

Evaluasi AKIP 2024

Page 7



3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan
1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.

2.	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang namun belum tersedianya Dokumen laporan tim kerja.		
C.	PELAPORAN KINERJA	15	11,7
3.	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi namun belum didukung dengan Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).		
D.	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25	17,5
4.	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai namun belum tersedianya Bukti dukung keterlibatan Tim SPI dalam evaluasi kinerja internal.		
	JUMLAH	100	75,7

b. Rekomendasi Atas Catatan Kekeurangan Untuk Perbaikan.

- 1) Dari hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 sebagaimana tercantum di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, agar :

NO.	KOMPONEN
A.	PERENCANAAN KINERJA
1.	Menyusun SOP Penyusunan Rencana Aksi dan ditanda tangani
B.	PENGUKURAN KINERJA
2.	Menyusun Dokumen laporan tim kerja dan ditanda tangani
C.	PELAPORAN KINERJA
3.	Bukti dukung Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan ditanda tangani
D.	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL
4.	Bukti dukung keterlibatan Tim SPI dalam evaluasi kinerja internal dan ditanda tangani

- 2) Tindaklanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Rekomendasi hasil evaluasi AKIP oleh APIP Inspektorat Kabupaten Cirebon sebanyak 4 rekomendasi telah ditindaklanjuti seluruhnya.

4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Tindaklanjut atas hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 atas implementasi SAKIP Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

NO.	REKOMENDASI	TINDAKLANJUT
	Rekomendasi hasil evaluasi AKIP Tahun 2023 oleh APIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sebanyak 4 rekomendasi	Rekomendasi seluruhnya telah ditindaklanjuti

9. Waktu Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dilaksanakan mulai tanggal 03 s/d 17 Maret 2025.

10. Gambaran Hasil Evaluasi

- a. Pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon adalah 75,70 Kategori Predikat BB (Sangat Baik), namun masih terdapat kelemahan, adalah sebagai berikut :

NO.	KOMPONEN	BOBOT	NILAI
A.	PERENCANAAN KINERJA	30	24
1.	Dalam pedoman penyusunan teknis perencanaan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika namun belum tersedianya SOP Penyusunan Rencana Aksi.		
B.	PENGUKURAN KINERJA	30	22,5

11. Penutupan

a. Simpulan

Dari hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon memperoleh nilai 75,70. Nilai tersebut masuk dalam kategori BB dengan interpretasi (Sangat Baik).

b. Penutup

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan terimakasih dan apresiasi kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon atas upaya-upaya dalam mengimplementasikan SAKIP pada tahun 2024. Selanjutnya agar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon beserta seluruh jajaran agar lebih memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan SAKIP sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas kinerja serta peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

Demikian laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 atas implementasi SAKIP Tahun 2024 pada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon disusun berdasarkan Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia (SAIPI) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


INSPEKTUR
KABUPATEN CIREBON
INSPEKTORAT
Drs. IYAN EDIYANA, M.M., M.Si., CGCAE, CGRE
Pembina Utama Muda
NIP. 19661209 199312 1 002

Tembusan :

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

